

**KOMITMEN KERAJAAN ARAB SAUDI DALAM  
IMPLEMENTASI *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*  
(SDGs) NOMOR 5 UNTUK MENJAMIN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk  
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S. Sos.)  
dalam bidang Hubungan Internasional



**Zakky Audani Rifky**

**NIM. 192219098**

**Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Juni, 2024**

## PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim*, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zakky Audani Rifky  
NIM : I92219098  
Program Studi : Hubungan Internasional  
Judul Skripsi : Komitmen Kerajaan Arab Saudi Dalam Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Nomor 5 Untuk Menjamin Pemberdayaan Perempuan

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti sebagai karya plagiat, maka saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang berlaku.

Surabaya, 21 Mei 2024



Yang Menyatakan,

Zakky Audani Rifky

NIM. I92219098

## PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

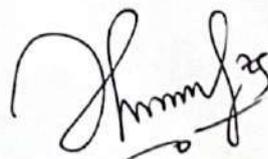
Setelah memeriksa dan memberikan arahan terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Zakky Audani Rifky  
NIM : I92219098  
Program Studi : Hubungan Internasional

yang berjudul: *Komitmen Kerajaan Arab Saudi Dalam Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 5 Untuk Menjamin Pemberdayaan Perempuan*, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 21 Mei 2024

Pembimbing



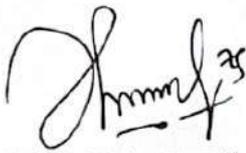
Dra. Hj. Wahidah Zein Br. Siregar, M.A., Ph.D  
NIP.196901051993032001

## PENGESAHAN

Skripsi oleh Zakky Audani Rifky dengan judul *Komitmen Kerajaan Arab Saudi Dalam Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 5 Untuk Menjamin Pemberdayaan Perempuan* telah dipertahankan dan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji Skripsi pada 4 Juni 2024.

### Tim Penguji Skripsi

Penguji I



Dra. Hj. Wahidah Zein Br. Siregar, M.A., Ph.D  
NIP.196901051993032001

Penguji II



Zaky Ismail, M.S.I  
NIP.198212302011011007

Penguji III



M. Fathoni Hakim, M.S.I  
198401052011011008

Penguji IV



Dr. Zudan Rosyidi, S.S., M.A  
198103232009121004

Surabaya, 4 Juni 2024

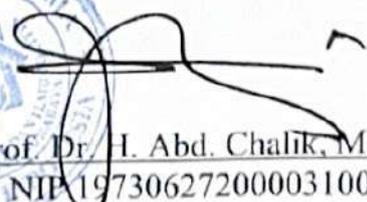
Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



  
Prof. Dr. H. Abd. Chalik, M.Ag.  
NIP.197306272000031002



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zakky Audani Rifky  
NIM : I 9221 9098  
Fakultas/Jurusan : FISIP / Hubungan Internasional  
E-mail address : Zakky.audani12@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Komitmen Kerajaan Arab Saudi Dalam Implementasi Sustainable  
Development Goals (SDGs) Nomor 5 Untuk Menjamin Pemberdayaan  
Perempuan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Maret 2025

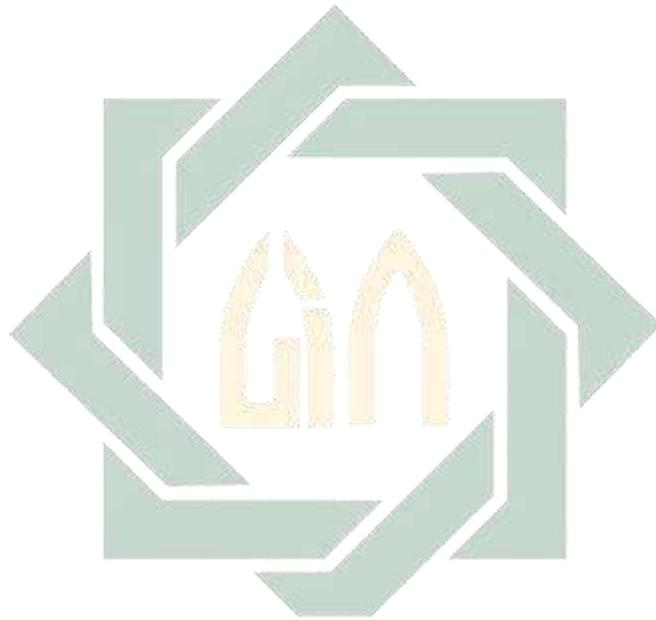
Penulis

( Zakky Audani Rifky )  
nama terang dan tanda tangan

## MOTTO

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يٰ

"Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain" QS. At-Taubah: 71"<sup>1</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>1</sup> Qur'an NU, "Surat At-Taubah Ayat 71: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap," accessed May 28, 2024, <https://quran.nu.or.id/at-taubah/71>.

## ABSTRACT

**Zakky Audani Rifky.** *"Commitments of Kingdom of Saudi Arabia in Implementing Sustainable Development Goals (SDGs) Number 5 To Ensure Women's Empowerment"* Sunan Ampel Islamic State University Surabaya, 2024.

*Sustainable Development Goals (SDGs) 5 is an international norm that which aim to achieve gender equality for women's throughout the world. Using a qualitative approach with descriptive research questions, this research seeks to describe how the Kingdom of Saudi Arabia implements SDGs no.5 as a solution to social inequality that has taken root in the lives of women in Saudi Arabia. This research uses documentation techniques to collect research data and interactionist analysis techniques from Miles and Huberman are used to analyze the data that has been obtained. Several key concepts used as a framework for thinking in this research are: Implementation, International Norms, and Women's Empowerment. Researcher finds that the Kingdom of Saudi Arabia has made a good commitment to implementing all of SDGs number 5 targets, even though there several areas that need to be improved. This research also shows that KSA has made a good women's empowerment based on indicators as argued by Naila Kabeer.*

**Keywords:** *Commitments; Kingdom of Saudi Arabia; Implementation; SDGs Number 5; Women's empowerment*

## ABSTRAK

**Zakky Audani Rifky.** *"Komitmen Kerajaan Arab Saudi Dalam Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 5 Untuk Menjamin Pemberdayaan Perempuan"* Universitas Islam Negeri Surabaya, 2024.

*Sustainable Development Goals (SDGs) no.5 adalah sebuah norma yang disepakati secara internasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender bagi kaum perempuan di seluruh dunia. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan pertanyaan penelitian yang bersifat deskriptif, penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana Kerajaan Arab Saudi melakukan implementasi SDGs no.5 sebagai sebuah solusi dari ketimpangan sosial yang telah mengakar pada kehidupan perempuan di Arab Saudi. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dalam mengumpulkan data penelitian dan teknik analisis interaksionis dari Miles dan Huberman digunakan untuk melakukan analisis data yang telah diperoleh. Beberapa konsep kunci yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah: Implementasi, Norma Internasional, dan Pemberdayaan Perempuan. Peneliti menemukan bahwa Kerajaan Arab Saudi telah melakukan komitmen yang cukup baik dalam implementasi seluruh target SDGs no 5, meski dalam beberapa area masih memerlukan peningkatan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa KSA telah melaksanakan pemberdayaan perempuan yang baik berdasarkan indikator yang dikemukakan oleh Naila Kabeer.*

**Kata Kunci:** *Komitmen; Kerajaan Arab Saudi; Implementasi; SDGs Nomor 5, Pemberdayaan perempuan*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta segala karunia-Nya. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur pada Ilahi Rabbi yang telah memberikan hidayahnya serta inayahnya kepada penulis, sehingga skripsi yang berjudul *Komitmen Kerajaan Arab Saudi Dalam Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 5 Untuk Menjamin Pemberdayaan Perempuan*.

Skripsi ini peneliti susun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (SI) pada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya. Selama penulisan skripsi ini, peneliti tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Akh. Muzzaki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
2. Prof. Dr. Abd. Chalik, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
3. M. Fathoni Hakim. M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Rizki Rahmadini Nurika, S.Hub.Int., M.A. selaku ketua Program Studi Hubungan Internasional

5. Dra. Hj. Wahidah Zein Br. Siregar, M.A., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang senantiasa mengarahkan dan membimbing peneliti dalam penyusunan skripsi ini
6. Dr. Zudan Rosyidi, S.S., M.A selaku dosen wali peneliti
7. Kepada kedua orang tua serta seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan penuh terhadap peneliti selama ini
8. Kepada manusia halal yakni: Arjun, Zikry, Rury, Jheny, Tarisha, Sindhu, dan Nanda yang telah memberi warna dan membantu peneliti selama masa perkuliahan di Uin Sunan Ampel Surabaya
9. Keluarga besar HI UINSA khususnya kelas C, teman-teman KKN, teman teman Salam Pergerakan, dan semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih banyak.

Dengan tersusunnya skripsi ini, peneliti berharap dapat memberi manfaat bagi peneliti dan semua pembaca serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hubungan Internasional dan ilmu-ilmu sosial. Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu peneliti harapkan untuk perbaikan penulisan penelitian selanjutnya.

Surabaya, 21 Mei 2024

Zakky Audani Rifky

## DAFTAR ISI

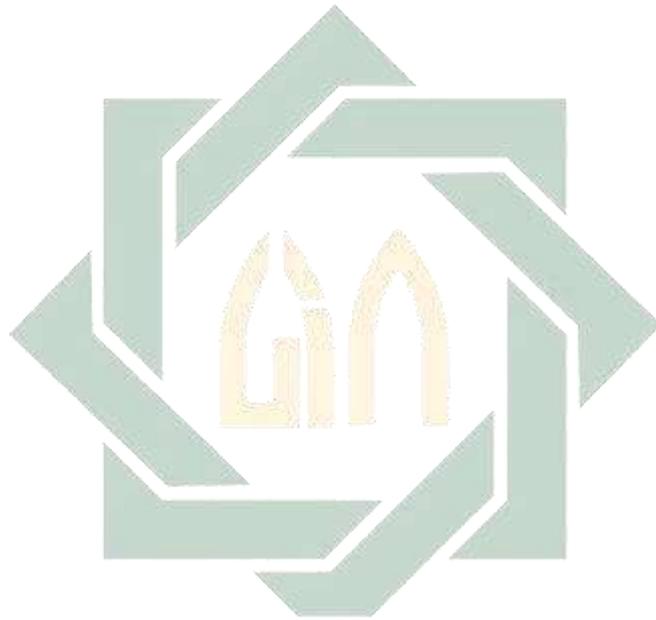
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI</b> .. Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR DIAGRAM</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Fokus Penelitian</b> .....	<b>5</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>5</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>5</b>
<b>1. Manfaat Akademis</b> .....	<b>5</b>
<b>2. Manfaat Praktis</b> .....	<b>5</b>
<b>E. Tinjauan Pustaka</b> .....	<b>5</b>
<b>F. Sitematika Penulisan Skripsi</b> .....	<b>16</b>
<b>BAB II</b> .....	<b>18</b>

<b>LANDASAN KONSEPTUAL</b> .....	<b>18</b>
<b>A. Landasan Konseptual</b> .....	<b>18</b>
1. <b>Komitmen</b> .....	<b>18</b>
2. <b>Kerajaan Arab Saudi</b> .....	<b>19</b>
3. <b>Implementasi</b> .....	<b>22</b>
4. <b><i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Nomor 5</b> .....	<b>25</b>
5. <b>Pemberdayaan Perempuan</b> .....	<b>29</b>
<b>B. Kerangka Konseptual</b> .....	<b>33</b>
<b>C. Argumentasi utama</b> .....	<b>35</b>
<b>BAB III</b> .....	<b>37</b>
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>37</b>
<b>A. Jenis dan Problema Penelitian</b> .....	<b>37</b>
<b>B. Unit dan Peringkat Analisis</b> .....	<b>38</b>
<b>C. Teknik Pengumpulan Data</b> .....	<b>39</b>
<b>D. Teknik Analisis Data</b> .....	<b>40</b>
a. <b>Reduksi Data (Kondensasi)</b> .....	<b>40</b>
b. <b>Penyajian Data</b> .....	<b>41</b>
c. <b>Penarikan Kesimpulan</b> .....	<b>42</b>
<b>E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data</b> .....	<b>42</b>
<b>BAB IV</b> .....	<b>43</b>
<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>43</b>
<b>A. Pemberdayaan Perempuan oleh Kerajaan Arab Saudi</b> .....	<b>43</b>
1. <b>Pemberdayaan perempuan dalam sektor pekerjaan</b> .....	<b>44</b>
2. <b>Pemberdayaan Perempuan dalam Peningkatan Kapasitas</b> .....	<b>50</b>
3. <b>Pemberdayaan Perempuan Dalam Aspek Kesehatan</b> .....	<b>52</b>

4. Pemberdayaan Perempuan Dalam Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	53
5. Pemberdayaan Perempuan Dalam Aspek Peradilan dan Militer ..	55
<b>B. Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 5 Sebagai Norma Internasional.....</b>	<b>59</b>
<b>C. Implementasi SDGs Nomor 5 Oleh Kerajaan Arab Saudi.....</b>	<b>62</b>
1. Implementasi Poin 5.1.....	64
2. Implementasi Poin 5.2.....	65
3. Implementasi Poin 5.3.....	67
4. Implementasi Poin 5.4.....	69
5. Implementasi Poin 5.5.....	70
6. Implementasi Poin 5.6.....	73
7. Implementasi Poin 5.a.....	77
8. Implementasi Poin 5.b .....	79
9. Implementasi Poin 5.c.....	80
<b>BAB V.....</b>	<b>90</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>90</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>92</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>93</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 17 Tujuan SDGs. Sumber: United Nations, “Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. .... 3



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Angka Harapan Hidup Perempuan di Negara Anggota G-20 Sumber : General Authority for Statistics, “Saudi Women The Partner of Success: International Women’s Day” .....	74
Diagram 2. Tingkat Kesuburan Perempuan di Negara Anggota G-20 (Dalam Persen), Sumber: General Authority for Statistics, “Saudi Women The Partner of Success: International Women’s Day” .....	75
Diagram 3, Presentase ibu hamil di Arab Saudi yang mengunjungi fasilitas Kesehatan sebelum melahirkan. Sumber: General Authority for Statistics, “Women Health and Reproductive Care Statistics Publication 2023. ....	75
Diagram 4, Presentase perempuan Arab Saudi yang telah menikah dan menjalankan program perencanaan keluarga (Kontrasepsi). Sumber: General Authority for Statistics, “Women Health and Reproductive Care Statistics Publication 2023.....	76



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Bab 9 UU Ketenagakerjaan Kerajaan Arab Saudi .....	44
Tabel 2. Status Pernikahan Individu Umur 15-19 Tahun di Arab Saudi Tahun 2010 Berdasarkan Gender.....	68
Tabel 3. Status Pernikahan Perempuan Umur 15-19 Tahun di Arab Saudi tahun 2022 .....	68
Tabel 4, Presentase kepemilikan lahan pertanian. Sumber: Sustainable Development Goals( SDGs) in KSA .....	78
Tabel 5, Presentase individu 15 tahun keatas dan tipe ponsel yang digunakan berdasarkan gender di seluruh kerajaan tahun 2019 .....	79
Tabel 6, Presentase individu 15 tahun keatas dan tipe ponsel yang digunakan berdasarkan gender di seluruh kerajaan tahun 2021 .....	80
Tabel 7. Indikator Pemberdayaan Perempuan Oleh Naila Kabeer.....	85



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Ketidaksetaraan kepada kaum perempuan telah menjadi permasalahan sosial yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Arab Saudi. Berdasarkan laporan “*Global Gender Gap Report*” yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum* pada 2016, Arab Saudi berada di peringkat 141 dari 144 negara yang menjadi subjek penilaian.<sup>2</sup> Hal ini membuktikan bahwa ketimpangan yang hadir dalam relasi antar gender di Arab Saudi cukup besar. Hal tersebut disebabkan oleh aturan- aturan dalam masyarakat Saudi, seperti *Guardianship System*, yang telah memaksa para perempuan untuk terbungkam didalam lingkungan rumah saja, sementara kaum laki – laki bebas untuk melaksanakan segala kegiatan di ruang publik. Kaum perempuan mendapat larangan untuk bepergian keluar rumah tanpa izin dari mahramnya, mereka tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pasangan, mereka juga mendapatkan diskriminasi dalam akses ke lapangan pekerjaan dan fasilitas Kesehatan.<sup>3</sup>

Kaum perempuan Arab Saudi pun kerap mengalami mendapatkan kekerasan baik secara fisik maupun mental. Kementerian Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Arab Saudi melaporkan terdapat 8016 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam periode waktu 1 tahun kalender

---

<sup>2</sup> Till Alexander Leopold, Vesselina Ratcheva, and Saadia Zahidi, *The Global Gender Gap Report 2016* (Geneva, Switzerland: World Economic Forum, 2016).

<sup>3</sup> Human Rights Watch, “Saudi Arabia: 10 Reasons Why Women Flee,” accessed November 13, 2023, <https://www.hrw.org/news/2019/01/30/saudi-arabia-10-reasons-why-women-flee>.

hijriyah hingga 13 Oktober 2015.<sup>4</sup> Pada tahun 2017, Ketua Komisi HAM Saudi Arabia melaporkan terdapat 1059 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke pengadilan.<sup>5</sup> Hal tersebut membuktikan dengan maraknya kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan Arab Saudi, namun mereka terbungkam atas dominasi kaum laki-laki atas diri mereka. Ruang gerak mereka menjadi terbatas, bahkan tak memiliki kemampuan untuk membela dirinya akan kekerasan yang dihadapkannya.

Seiring berkembangnya zaman, Kerajaan Arab Saudi perlahan mulai memperhatikan hak-hak kaum perempuan. Upaya-upaya Kerajaan Arab Saudi dalam mengatasi ketimpangan relasi antara kaum laki-laki dan perempuan ini salah satunya melalui implementasi SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang dikeluarkan oleh PBB khususnya pada tujuan No.5 yaitu *gender equality*. SDGs sendiri ialah sebuah norma yang disepakati oleh 193 Negara anggota PBB dalam untuk mewujudkan Agenda 2030 Pembangunan Berkelanjutan yang menyediakan kerangka kerja untuk perdamaian dan kemakmuran bagi setiap entitas di dunia yang dituangkan secara spesifik melalui 17 tujuan<sup>6</sup> seperti yang terlihat pada gambar 1 berikut:

---

<sup>4</sup> Arab News, "8,016 Cases of Abuse Recorded in One Year," December 16, 2015, <https://www.arabnews.com/saudi-arabia/news/851131>.

<sup>5</sup> Arab News, "What Saudi Arabia Is Doing to End Violence against Women," November 25, 2018, <https://www.arabnews.com/node/1410516/saudi-arabia>.

<sup>6</sup> United Nations, "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution Adopted by the General Assembly on 25 September 2015. A/RES/70/1" (UN General Assembly, Seventieth Session, New York: United Nations, 2015).



Gambar 1. 17 Tujuan SDGs. Sumber: United Nations, “Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development.”

Penelitian yang sedang dilakukan saat ini berfokus pada SDGs nomor 5 yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender bagi seluruh perempuan di dunia. Meski tujuan no.5 dalam SDGs berfokus pada kesetaraan gender, setiap bagian lainnya pun juga terdapat elemen gender, misalnya pada tujuan no.6.2 yang memiliki tujuan untuk mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan adil bagi semua orang dan mengakhiri kebiasaan buang air besar sembarangan, juga memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan anak perempuan serta mereka yang berada dalam situasi rentan. Kemudian pada tujuan no 8.5 yang ber- intensi untuk menciptakan lapangan kerja produktif yang layak bagi perempuan dan laki laki, termasuk generasi muda dan penyandang disabilitas.

Kerajaan Arab Saudi menegaskan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, dan berupaya untuk menginvestasikan energinya dan mengaktifkan peran pentingnya di tingkat lokal dan internasional. Kerajaan telah menetapkan

tujuan komprehensif bagi perempuan untuk meningkatkan kontribusi mereka terhadap pasar tenaga kerja, mempertahankan hak-hak mereka di sektor kesehatan dan pendidikan, yang sejalan dengan SDGs nomor 5 yang dapat dilihat dalam laporan *Sustainable Development Goals in Kingdom of Saudi Arabia: Status Quo Statistical Report 2018* yang dikeluarkan oleh Badan Statistik Arab Saudi. Adapun tujuan komprehensif yang diupayakan oleh kerajaan Arab Saudi dalam menyuarkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan tersebut antara lain ;

- a. Posisi kepemimpinan yang lebih banyak untuk perempuan
- b. Menciptakan lebih dari 450 ribu pekerjaan baru untuk perempuan
- c. Meluncurkan e- platform bagi para pencari kerja perempuan
- d. Menciptakan program produktif rumah tangga
- e. Meluncurkan program Wusool.
- f. Meluncurkan program Qurra
- g. Mengembangkan mekanisme bagi perempuan rentan untuk dapat bekerja secara *remote*
- h. Meluncurkan program pelatihan (Doroob) .<sup>7</sup>

Penelitian yang sedang dilakukan saat ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana komitmen Kerajaan Arab Saudi dalam melaksanakan program SDGs nomor 5 untuk menjamin kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di negaranya

---

<sup>7</sup> General Authority for Statistics, "Sustainable Development Goals( SDGs) in KSA: Status Quo Statistical Report," 2018, [https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/sustainable\\_development\\_goals\\_sdgs\\_in\\_ksa\\_-en.pdf](https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/sustainable_development_goals_sdgs_in_ksa_-en.pdf).

## **B. Fokus Penelitian**

Bagaimana komitmen Kerajaan Arab Saudi dalam implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor 5 untuk menjamin pemberdayaan perempuan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan fokus penelitian yang telah peneliti paparkan, tujuan penelitian ini ialah untuk melihat dan menjelaskan bagaimana komitmen Kerajaan Arab Saudi dalam implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor 5 untuk menjamin pemberdayaan perempuan.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Akademis**

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharap dapat menjadi tambahan referensi berkenaan dengan Implementasi SDGs nomor 5 di berbagai negara lainnya. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan dalam pembuatan penelitian seterusnya.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban untuk memenuhi persyaratan bagi peneliti untuk mendapatkan gelar sarjana dalam ilmu sosial. Juga diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman, serta meningkatkan kemampuan peneliti dalam penelitian lainnya pada studi Hubungan Internasional.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka dihadirkan untuk menyelaraskan penelitian dengan berbagai penelitian yang telah hadir sebelumnya. Tinjauan Pustaka juga

digunakan untuk melengkapi kekosongan dari studi yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat menjadi penentu perbedaan posisi penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian- penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.<sup>8</sup> Berikut ini adalah penelitian- penelitian terdahulu tersebut:

1. Penelitian pertama berasal dari Artikel yang dibuat oleh Ilmi Dwiastuti, Anggara Raharyo, Muhammad Farid, dan Riski Baskoro dari Universitas Pelita Harapan. Penelitian ini berjudul: **“Komitmen Indonesia Dalam Implementasi Sdgs Nomor 5 Untuk Menjamin Keamanan Manusia Khususnya Perempuan (2015-2021)”**. Penelitian ini membahas tentang komitmen pemerintah Indonesia dalam menjamin kesetaraan gender sebagai bagian dari SDGs nomor 5. Dwiastuti dan kawan- kawan memaparkan strategi dan kapasitas yang diperlukan dalam mengatasi keamanan manusia sesuai elemennya. Peneliti juga menggunakan metode kualitatif dengan content analysis dimana para peneliti mengkaji berbagai sumber dari dokumen resmi. Kemudian peneliti menganalisa implementasi SDGs nomor 5 menggunakan indikator yang sudah disediakan oleh Bappenas.<sup>9</sup>

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sejak 2015 hingga 2021 implementasi SDGs oleh Pemerintah Indonesia belum cukup sesuai dengan target secara umum, ditemukan bahwa implementasi target no.4

---

<sup>8</sup> John W. Creswell and J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.*, Fifth Edition (SAGE Publications, Inc., 2018).

<sup>9</sup> Ilmi Dwiastuti et al., “KOMITMEN INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI SDGs NOMOR 5 UNTUK MENJAMIN KEAMANAN MANUSIA KHUSUSNYA PEREMPUAN (2015-2021),” n.d.

dari SDGs no 5 oleh Pemerintah Indonesia masih sangat kurang, hanya ditemukan penurunan sebesar 0.04% dari presentase pernikahan dini di Indonesia. Meski begitu para peneliti menyadari bahwa pemerintah Indonesia sudah cukup menunjukkan perubahan yang positif pada penerapan target- target SDGs lainnya.

Penelitian ini mampu memberi dukungan terhadap penelitian yang sedang peneliti lakukan, meskipun penelitian tersebut menggunakan negara Indonesia sebagai unit analisisnya. Penelitian yang sedang peneliti lakukan menggunakan Arab Saudi sebagai unit analisisnya. Kemudian jika penelitian Ilmi Dwiastuti dan kawan- kawan fokus pada konsep keamanan manusia, penelitian yang sedang peneliti lakukan lebih fokus kepada konsep Pemberdayaan perempuan.

2. Penelitian kedua berasal dari artikel yang ditulis oleh Junita Budi Rachman, Yanyan Mochamad Yani, dan Sayitri Aditiany dari Universitas Padjajaran. Penelitian ini berjudul ***“Human Security In The Sustainable Development Goal 5 (SDGs 5) And Its Implementation In Indonesia”***. Dengan menggunakan pendekatan keamanan manusia dalam studi hubungan internasional, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah bidang-bidang keamanan manusia tersebut terwakili dalam Tujuan 5 SDGs dan untuk mengetahui bagaimana bidang-bidang tersebut diatur dan diterapkan di Indonesia.

Para peneliti berpendapat bahwa Keamanan manusia adalah kunci pembangunan berkelanjutan. Untuk memastikan keamanan manusia yang

berkelanjutan tersebut, anak perempuan dan perempuan dewasa harus dilibatkan. Kesetaraan gender bagi perempuan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 5 dan implementasinya di Indonesia dapat dicapai jika bidang keamanan manusia mempertimbangkan secara menyeluruh.<sup>10</sup>

Penelitian diatas dapat memberikan dukungan terhadap penelitian yang sedang peneliti lakukan berkaitan dengan bagaimana SDGs diimplementasikan, namun penelitian tersebut melihat SDGs diimplementasikan melalui pendekatan Keamanan Manusia dan studi kasusnya adalah negara Indonesia, sedang penelitian yang sedang dilakukan berupaya untuk melihat bagaimana SDGs nomor 5 diimplementasikan oleh Kerajaan Arab Saudi melalui pemberdayaan perempuan.

3. Penelitian ketiga berasal dari artikel yang ditulis oleh Eun Mee Kim dari Ewha Womans University, Korea Selatan. Penelitian ini berjudul "***Gender and the Sustainable Development Goals***". Penelitian yang kim lakukan berfokus pada keadaan kesetaraan gender dan SDGs di Korea selatan dan ia mengungkapkan bahwa ketidaksetaraan gender tidak dapat diperbaiki secara otomatis melalui pembangunan ekonomi atau pembangunan sosial seperti yang diasumsikan secara inheren dalam SDGs. Kim menunjukkan

---

<sup>10</sup> Junita Budi Rachman, Yanyan Mochamad Yani, and Sayitri Aditiany, "Human Security In The Sustainable Development Goal 5 (SDGs 5) And Its Implementation In Indonesia," in *Proceedings of the 2nd International Conference on Social and Political Development (ICOSOP 2017)* (2nd International Conference on Social and Political Development (ICOSOP 2017), Medan, Indonesia: Atlantis Press, 2018), <https://doi.org/10.2991/icosop-17.2018.1>.

dalam penelitiannya bahwa Korea Selatan tidak mampu mengurangi ketidaksetaraan gender meskipun pembangunan ekonomi dan sosial telah tercapai. Bahkan demokratisasi politik mungkin tidak cukup untuk membawa perbaikan mendasar terhadap ketidaksetaraan gender seperti yang terjadi di Korea Selatan. Kim juga mengungkapkan bahwa peningkatan tingkat pendidikan dan pekerjaan dari kaum perempuan ternyata tidak meningkatkan pemberdayaan perempuan atau menurunkan tingkat ketidaksetaraan gender.<sup>11</sup>

Penelitian Kim dapat memberi dukungan terhadap penelitian yang sedang peneliti lakukan, karena dapat memberikan gambaran baru berkenaan dengan hubungan gender dan SDGs yang membuktikan bahwa dengan tingkat pembangunan ekonomi dan sosial yang tinggi tidak serta merta memberikan pengaruh besar dalam penurunan tingkat kesetaraan gender sebagaimana diasumsikan secara inheren dalam SDGs. Namun penelitian Kim berfokus pada bagaimana SDGs diterapkan di Korea Selatan, dan ia berfokus pada keseluruhan, tidak hanya pada SDGs nomor 5, sedang penelitian yang sedang dilakukan berfokus untuk melihat bagaimana SDGs nomor 5 diimplementasikan oleh Kerajaan Arab Saudi.

4. Penelitian keempat berasal dari artikel jurnal yang dibuat oleh Bina Agarwal dari *University of Manchester, UK*. Penelitian ini berjudul **"Gender Equality, Food Security and the Sustainable Development Goals"**. Dalam penelitiannya, Agarwal mengungkapkan bahwa tujuan ke-5

---

<sup>11</sup> Eun Mee Kim, "Gender and the Sustainable Development Goals," *Global Social Policy* 17, no. 2 (August 2017): 239–44, <https://doi.org/10.1177/1468018117703444>.

dari SDGs memiliki potensi substansial dalam usaha negara menjamin keamanan pangan. Ia juga mengungkap bahwa didalamnya terdapat kaum perempuan yang memiliki peran krusial dalam keamanan pangan baik itu dalam skala rumah tangga maupun nasional. Hal ini berlandaskan dari temuan Agarwal yang menyatakan 43% pekerja pertanian dan perkebunan di Asia ialah kaum perempuan, dan 47% pekerja pertanian dan perkebunan di Afrika ialah kaum perempuan. Meski begitu, jumlah kepemilikan atas lahan pertanian dan perkebunan masih oleh kaum perempuan masih sangat rendah. Agarwal ungkap dalam penelitiannya bahwa hanya 10% lahan pertanian dimiliki oleh perempuan di Ghana, 5% di Kenya, dan 22-30% di Amerika Latin.<sup>12</sup>

Penelitian yang dilakukan Agarwal dapat mendukung penelitian yang sedang peneliti lakukan, namun penelitian tersebut hanya berfokus pada bagaimana konsep kesetaraan gender yang disuarakan oleh tujuan ke-5 dari SDGs memiliki pengaruh dalam keamanan pangan rumah tangga dan nasional yang didalamnya terdapat kaum perempuan sebagai aktor krusial dalam pemenuhan 2 komponen penting tersebut, sedang penelitian yang sedang dilakukan berfokus pada keseluruhan aspek dari tujuan ke-5 dari SDGs dan bagaimana implementasinya di Kerajaan Arab Saudi.

5. Penelitian kelima berasal dari artikel yang ditulis oleh Kelly Patricia Ernst, Rhaissa Pagot, Jussara Reis Pra dari *Federal University of Rio Grande do Sul, Brazil*. Penelitian ini berjudul **"Sustainable Development Goal 5:**

---

<sup>12</sup> Bina Agarwal, "Gender Equality, Food Security and the Sustainable Development Goals," *Current Opinion in Environmental Sustainability* 34 (October 2018): 26–32, <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2018.07.002>.

**Women's Political Participation in South America".** Penelitian yang dilakukan oleh Ernst dan kawan-kawan berfokus untuk melihat bagaimana tujuan kelima dari SDGs mencakup kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, penghapusan segala bentuk diskriminasi, praktik pelecehan terhadap anak dan perempuan, jaminan hak seksual dan reproduksi, dan partisipasi penuh dalam kehidupan politik ekonomi, dan publik. Secara khusus penelitian ini berfokus pada tujuan 5.5 yakni partisipasi politik dari kaum perempuan di Amerika Latin.

Para peneliti mengungkap bahwa Amerika Latin telah mengalami kemajuan yang progresif berkenaan dengan kebijakan publik yang bersinggungan dengan aspek gender. Para peneliti juga mengungkap bahwa kuota elektoral berdasarkan gender telah diaplikasikan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik di Amerika Latin. Argentina, Bolivia, Ecuador, Peru, dan Venezuela memiliki proporsi kuota terbesar yakni 50% dari kursi di Dewan Perwakilan Rakyat masing masing negara.<sup>13</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Kelly Patricia Ernst dan kawan-kawan mampu mendukung penelitian yang sedang dilakukan terkait dengan penerapan SDGs nomor 5 di Amerika Latin namun penelitian tersebut lebih fokus terhadap target 5.5 dari SDGs yakni berkenaan dengan partisipasi kaum perempuan di sektor politik, sedang penelitian yang sedang dilakukan memiliki fokus yang lebih besar yakni bagaimana

---

<sup>13</sup> Kelly Patricia Ernst, Rhaíssa Pagot, and Jussara Reis Prá, "Sustainable Development Goal 5: Women's Political Participation in South America," *World Development Sustainability* 4 (June 2024): 100138, <https://doi.org/10.1016/j.wds.2024.100138>.

komitmen Kerajaan Arab Saudi dalam implementasi SDGs nomor 5 secara keseluruhan.

6. Penelitian keenam berasal dari artikel jurnal yang dibuat oleh Mega Hardiyanti dan Sri Yuniati dari Universitas Jember, dengan judul **Penjaminan Hak-Hak Perempuan dalam Visi Saudi Arabia 2030 (Guarantee Of Women's Rights In Vision Saudi Arabia 2030).**

Penelitian tersebut berusaha mengungkap bagaimana Negara Saudi Arabia sebagai entitas pelindung bagi masyarakatnya melaksanakan Penjaminan Terhadap Hak- Hak Perempuan melalui implementasi Visi Saudi Arabia 2030. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini melihat bagaimana Hak- Hak perempuan di Arab Saudi dijamin dalam Vision 2030 dan sesuai dengan CEDAW. Penelitian ini juga melihat bahwa vision 2030 telah membuat negara Arab Saudi menjadi negara yang modern, khususnya bagi perempuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mega dan Sri dapat mendukung penelitian yang sedang dilakukan saat ini, Namun penelitian tersebut fokus Untuk menjabarkan poin- poin yang tertuang dalam Vision 2030 berkenaan dengan bagaimana hak – hak perempuan dijamin, sedang penelitian yang dilakukan kali ini ialah berusaha melihat bagaimana Komitmen Kerajaan Arab Saudi Dalam Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Nomor 5 Untuk Menjamin Pemberdayaan Perempuan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Mega Hardiyanti and Sri Yuniati, "PENJAMINAN HAK-HAK PEREMPUAN DALAM VISI SAUDI ARABIA 2030," *Journal of Feminism and Gender Studies* 1, no. 1 (January 27, 2021): 1, <https://doi.org/10.19184/fgs.v1i1.21552>.

7. Penelitian ketujuh berasal dari artikel yang dibuat oleh Martin Hvidt dengan judul ***“The New Role of Women In The New Saudi Arabian Economy”***. Martin mengungkap dalam tulisannya, bahwa MBS telah memilih untuk melonggarkan kekuasaan agama yang telah menjadi inti dalam masyarakat, dan hal ini dilakukan untuk memenuhi tujuan ekonomi dan politik. 60% dari jumlah penduduk Arab Saudi adalah kaum muda sehingga penting untuk MBS yang juga merupakan kaum muda untuk dapat menarik perhatian mereka.<sup>15</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Martin dapat mendukung penelitian yang sedang peneliti lakukan, karena ia mengungkap dalam analisisnya bahwa membawa perempuan ke dalam partisipasi dunia kerja yang lebih besar di Arab Saudi akan membuat perubahan signifikan dalam potensi ekonomi yang telah ada, mengingat hampir setengah dari jumlah pekerja di Arab Saudi merupakan expat dan pekerja migran. Apalagi didukung dengan kaum perempuan Arab Saudi yang sangat terdidik saat ini. Hal ini berdampingan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan

8. Penelitian kedelapan berasal dari tesis yang di tulis oleh Vira Vierentina dari Universitas Andalas, dengan judul **“Analisis Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Dalam Visi Arab Saudi 2030”**. Dalam penelitiannya, Vira mengungkapkan bahwa poin-poin yang terkandung dalam Vision 2030, telah membuktikan keinginan Pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan Arab Saudi. Dengan

---

<sup>15</sup> Martin Hvidt, “The New Role of Women in the New Saudi Arabian Economy,” *Videnscenter Om Det Moderne Mellemøsten*, 2018.

menggunakan pendekatan kualitatif- deskriptif, Vira menganalisis usaha pemerintah Arab Saudi dalam meningkatkan kesempatan perempuan dalam dunia kerja dalam kurun waktu 2016-2019. Ia mendapati hasil bahwa upaya- upaya yang telah dilakukan Pemerintah Arab Saudi masih terhalang oleh Guardian System dalam sistem kepemilikan yang membatasi para perempuan untuk mendapatkan akses ke sumberdaya.

Penelitian Vira dianggap selaras dan mampu mendukung penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti saat ini, Namun penelitian Vira hanya fokus terhadap bagaimana kondisi pemberdayaan ekonomi perempuan pasca diluncurkannya vision 2030 dan hanya dalam rentang waktu 2016-2019, sedang penelitian yang sedang dilakukan saat ini berusaha melihat bagaimana pemberdayaan perempuan selaras dengan proses Implementasi SDGs khususnya no.5 oleh Kerajaan Arab Saudi.<sup>16</sup>

9. Penelitian ke sembilan berasal dari Artikel yang ditulis oleh Sana Naseem dan Kamini Dhruva dari Al- Yamamah University, Riyadh. Artikel ini berjudul **“Issues and Challenges of Saudi Female Labor Force and the Role of Vision 2030: A Working Paper”** dan dipublikasikan dalam jurnal *International Journal of Economics and Financial Issues*.<sup>17</sup> Penelitian tersebut berusaha mengungkap apa saja tantangan- tantangan yang dihadapi oleh para pekerja perempuan Arab Saudi. Ia menyoroti bahwa

---

<sup>16</sup> Vira, Vierentina, “ANALISIS UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN DALAM VISI ARAB SAUDI 2030 - eSkripsi Universitas Andalas,” 2020, <http://scholar.unand.ac.id/71979/>.

<sup>17</sup> Sana Naseem and Kamini Dhruva, “Issues and Challenges of Saudi Female Labor Force and the Role of Vision 2030: A Working Paper,” *International Journal of Economics and Financial Issues* Vol.7, no. 4 (December 1, 2017): 23–27.

pekerja perempuan Saudi terkena dampak yang cukup besar dari budaya patriarki dan beberapa pelarangan yang diatur oleh negara. Oleh karena itu para perusahaan lebih suka untuk merekrut pekerja lelaki dan pekerja imigran, yang juga lebih *cost-effective* dibanding perempuan. Penelitian tersebut dianggap dapat mendukung penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti dengan memberikan sorotan dari tantangan- tantangan yang dihadapi oleh pekerja perempuan Arab Saudi.

10. Penelitian ke sepuluh berasal dari artikel yang dibuat oleh Aris Rosida, dengan judul **“Wacana Modernisasi Dalam Tantangan Peradaban, Peran Perempuan Sebagai Tonggak Sejarah Arab Saudi”**. Tulisan ini memuat penjelasan berkenaan sejarah, dan tantangan para perempuan Arab Saudi untuk memiliki ruang gerak di kehidupan publik. Tulisan ini juga berusaha mengungkap alasan pemerintah Arab Saudi yang lebih simpatik pada kaum perempuan dewasa ini. Persamaan Tulisan Aris dengan penelitian ini adalah berkenaan dengan penggambaran bagaimana kondisi ruang gerak bagi segenap Perempuan Arab Saudi untuk melakukan aktivitas publik. Sedang perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis ialah Tulisan Aris ini hanya berfokus pada kajian perempuan di masa lampau, sedang penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana pemberdayaan perempuan dijamin oleh Kerajaan Arab Saudi

setelah adanya SDGs nomor 5 sebagai kerangka global untuk mewujudkan kesetaraan gender di seluruh dunia.<sup>18</sup>

## **F. Sitematika Penulisan Skripsi**

Untuk dapat memahami pembahasan tentang Penelitian yang sedang dilakukan saat ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana komitmen Kerajaan Arab Saudi dalam mengupayakan kesetaraan gender di negaranya, peneliti membuat sistematika penulisan yang terbagi kedalam lima bab sebagai berikut:

**Bab I** yang merupakan pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika penulisan skripsi.

**Bab II**, menguraikan tentang kerangka konseptual. Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Berikutnya peneliti akan menentukan Kerangka Konseptual yang digunakan oleh peneliti untuk memahami topik penelitian secara lebih mendalam. Adapun kerangka konseptual yang peneliti gunakan adalah Norma Internasional. Bab ini juga akan digunakan oleh peneliti untuk menyampaikan argumentasi utamanya terkait penelitian yang sedang dilakukan.

**Bab III**, merupakan uraian tentang metode penelitian. Pada bab ini, peneliti akan melakukan pembahasan berkenaan dengan metode penelitian yang digunakan. Bab ini terdiri dari jenis problema penelitian, dimana peneliti

---

<sup>18</sup> Anis Rosida, "WACANA MODERNISASI DALAM TANTANGAN PERADABAN, PERAN PEREMPUAN SEBAGAI TONGGAK SEJARAH ARAB SAUDI," *Palita: Journal of Social-Religion Research* 3, no. 1 (August 27, 2018): 81–96, <https://doi.org/10.24256/pal.v3i1.195>.

menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan pertanyaan penelitian deskriptif, kemudian dilanjutkan dengan unit dan perangkat analisis, yang mana peneliti memakai tingkat analisis level negara- bangsa, selanjutnya teknik pengumpulan data dimana peneliti menggunakan teknik Studi Literatur, dan dilanjutkan dengan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik validitas data.

**Bab IV**, merupakan pembahasan. Bab ini akan berisikan uraian tentang hasil penelitian. Pada bab ini, peneliti akan memaparkan data maupun informasi yang telah ditemukan dalam proses penelitian. Setelahnya, akan dilakukan analisis data dan menautkannya dengan konsep yang telah dipilih sebelumnya. Pada bab ini pula akan dijawab pertanyaan dari fokus penelitian yang telah diajukan oleh peneliti.

**Bab V**, merupakan bagian penutup. Peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Pada bagian akhir ini juga akan memuat saran untuk pihak- pihak yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

## BAB II

### LANDASAN KONSEPTUAL

#### A. Landasan Konseptual

##### 1. Komitmen

Menurut KBBI, komitmen ialah suatu perjanjian yang memiliki keterikatan untuk melakukan sesuatu atau memenuhi suatu kontrak yang telah ditentukan.<sup>19</sup> Komitmen dapat dipahami sebagai suatu keadaan dari suatu individu/ sekelompok dimana mereka terikat dalam setiap tindakannya. Keyakinan akan muncul sebagai hasil dari sebuah Tindakan komitmen yang akan memberi tunjangan aktivitas dan segenap keterlibatannya. Menurut Griffin, seorang individu/ kelompok akan menganggap diri mereka sebagai seorang anggota sejati dari sebuah organisasi jika memiliki komitmen yang tinggi. Berlaku juga sebaliknya, jika seorang individu/ kelompok yang mempunyai komitmen rendah maka cenderung menganggap dirinya sebagai bagian luar, dan mereka tidak menginginkan kehadirannya dalam jangka Panjang di organisasi.<sup>20</sup>

Individu atau kelompok yang mempunyai keinginan kuat, kesiapan usaha dalam pemenuhan tujuan organisasi, dan keyakinan dalam organisasi makai mereka dapat dikategorikan kedalam anggota yang ber-komitmen tinggi dalam satu organisasi atau kumpulannya. Ketika

---

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Komitmen," n.d., <https://kbbi.web.id/komitmen>.

<sup>20</sup> Ricky W. Griffin, *Manajemen*, 7 (Erlangga, 2004).

seseorang telah berhasil untuk berkomitmen dalam sebuah organisasi berarti bahwa mereka perlu menyesuaikan diri dengan nilai- nilai yang telah hadir di dalam tubuh organisasi tersebut, dan memberikan kesamaan Langkah untuk memenuhi tujuan tertentu dari organisasi.

Sebagai bagian dari anggota PBB, Kerajaan Arab Saudi telah menunjukkan komitmen yang cukup baik dalam implementasi norma SDGs khususnya nomor 5 sebagai kerangka yang disepakati bersama oleh negara- negara anggota PBB untuk mewujudkan kesetaraan gender di seluruh dunia. Adapun komitmen kerajaan Arab Saudi dalam implementasi SDGs nomor 5 ditunjukkan dalam beberapa aspek seperti; penyediaan payung hukum berupa dekrit kerajaan maupun undang- undang yang menyuarakan pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender seperti Dekrit kerajaan M/96 yang mengamandemen UU Anti pelecehan yang berhasil membuat perempuan lebih ter- proteksi.<sup>21</sup> Kemudian penerbitan dekrit kerajaan M/85 yang mencabut larangan berkendara bagi para perempuan.<sup>22</sup> Selain itu, komitmen dalam implementasi SDGs juga ditunjukkan oleh kerajaan melalui publikasi data terkait target- target yang terkandung dalam SDGs khususnya nomor 5.

## **2. Kerajaan Arab Saudi**

Arab Saudi atau Kerajaan Arab Saudi merupakan sebuah negara dengan sistem pemerintahan monarki absolut, atau dengan kata lain Arab

---

<sup>21</sup> Riyadh Bureau, "Saudi Arabia Amends Anti- Harassment Law," January 15, 2021, <https://www.riyadhbureau.com/p/name-and-shame>.

<sup>22</sup> The Embassy of The Kingdom of Saudi Arabia, "King Salman Issues Royal Decree: Women Will Drive in Saudi Arabia," September 26, 2017, <https://www.saudiembassy.net/press-release/king-salman-issues-royal-decree-women-will-drive-saudi-arabia>.

Saudi ialah sebuah negara yang mana seorang Raja menjadi simbol penguasa dan juga berperan sebagai kepala pemerintahannya. Hal ini berbeda dengan system negara Monarki Konstitusional, yang mana Raja ialah hanya sebagai Simbol Kepala negara, namun Kepala Pemerintahannya dipimpin oleh Seorang Perdana Menteri. Meski Raja menjadi kepala pemerintahan dan kepala negara, semua wewenang urusan kenegaraan tidak semuanya dilimpahkan kepada Raja, melainkan juga kepada putra mahkota dan para Menteri.

Secara resmi Kerajaan Arab Saudi baru didirikan pada 23 September 1932, ketika kerajaan di wilayah Hijaz dan Najd disatukan. Kerajaan Arab Saudi menjadi penting bagi wilayah Timur Tengah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, karena di tempat inilah dua kota suci agama Islam berada, yakni Mekah dan Madinah. Sepanjang sejarah kekhalifahan Islam, penguasaan atas dua kota suci ini menjadi semacam legitimasi bagi para penguasa Muslim, begitu pula bagi Kerajaan Arab Saudi. Nama kerajaan ini diambil dari nama keluarga penguasa setempat, yakni Al-Saud.<sup>23</sup>

Pendiri Kerajaan Arab Saudi era modern, sekaligus raja pertamanya adalah Abdulaziz bin Saud (berkuasa 1932-1953). Pada tahun 1953, ketika Abdulaziz bin Saud meninggal, tahta diteruskan kepada putra pertamanya yang bernama Saud bin Abdulaziz (berkuasa 1953-1964). Kemudian secara berturut-turut tahta diteruskan kepada anak-anak

---

<sup>23</sup> Harry St. John Bridger Philby, Joshua Teitelbaum, and William L. Ochenswald, "Saudi Arabia," March 4, 2024, <https://www.britannica.com/place/Saudi-Arabia>.

Abdulaziz yang lain, atau saudara laki-laki Saud bin Abdulaziz: Faisal bin Abdulaziz (berkuasa 1964-1975), Khalid bin Abdulaziz (berkuasa 1975-1982), Fahd bin Abdulaziz (berkuasa 1982-2005), Abdullah bin Abdulaziz (berkuasa 2005-2015), dan Salman bin Abdulaziz (2015-sekarang).<sup>24</sup>

Legitimasi kekuasaan monarki Arab Saudi sepanjang periode ini masih tetap bertahan. Kekuasaan rezim Al-Saud yang sudah berkuasa sejak tahun 1932 hingga sekarang masih menjadi sebuah anomali bagi negara-negara tetangga sekitarnya yang juga mempunyai kekuasaan absolut di Timur Tengah. Karena kemonarkiannya ini, banyak beberapa pihak memberi tantangan berkejolak seperti terjadinya peristiwa Arab Spring dan pembentukan CLDR (Committee for the Defense of Legitimate Right) dan ARC (Advice and Reformation Committee) yang dipimpin Osama bin Laden.<sup>25</sup> Namun seiring perubahan zaman, terdapat hal menarik di pemerintahan Arab Saudi yaitu perubahan arah kekuasaan negara lebih moderat dari kekuasaan- kekuasaan sebelumnya. Hal ini merupakan sebuah langkah baru dan momentum penting yang dicetuskan oleh Pangeran Mohammed bin Salman al-Saud dalam visi 2030 guna melepaskan ketergantungan kekuasaan pemerintah yang selama ini bersandar pada sektor minyak serta menjadi sebuah tantangan reformasi ekonomi yang mengesankan.

---

<sup>24</sup> Alia Chughtai, "Line of Succession to Saudi Arabia's Throne," June 21, 2017, <https://www.aljazeera.com/news/2017/6/21/line-of-succession-to-saudi-arabias-throne>.

<sup>25</sup> Anouar Boukhars, "Crisis of Legitimacy In Saudi Arabia," January 2005.

### 3. Implementasi

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi dapat dipahami sebagai pelaksanaan atau penerapan.<sup>26</sup> Secara umum istilah Implementasi merujuk pada rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Implementasi dilaksanakan setelah dihadirkan sebuah perencanaan dan kebijakan yang merupakan hasil dari pengambilan keputusan. Kebijakan yang akan diterapkan mungkin dapat berbeda dari apa yang telah menjadi perencanaan sebelumnya. Hal tersebut terjadi akibat hadirnya distorsi implementasi kebijakan yang menjadi substansi primer bagi segenap pelaksana kebijakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>27</sup>

Menurut Van Meter dan Van Horn, Implementasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang atau pemerintah demi mewujudkan tujuan dari keputusan kebijaksanaan.<sup>28</sup> Kemudian menurut Mazmanian dan Sabatier, Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan program yang selaras dengan tahapan-tahapan yang telah disepakati dalam sebuah kebijakan demi terwujudnya kepentingan atau tujuan yang terkandung didalamnya.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Implementasi," accessed April 17, 2024, <https://kbbi.web.id/implementasi>.

<sup>27</sup> Malcolm L. Goggin, ed., *Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation* (Glenview, Ill: Scott, Foresman/Little, Brown Higher Education, 1990).

<sup>28</sup> Erwan Agus Purwanto and Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: Gave Media, 2012).

<sup>29</sup> Daniel A. Mazmanian and Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy*, The Scott, Foresman Public Policy Analysis and Management Series (Glenview, Ill: Scott, Foresman, 1983).

Implementasi sebuah kebijakan berkaitan erat dengan bentuk pelaksanaan dari program kerja. Program kerja dilaksanakan demi mengetahui efektivitas dari kebijakan yang telah dihasilkan, dilandaskan pada pengalokasian sumber daya yang tersedia untuk mencapai kesesuaian pada evaluasi yang dilakukan pada tahap akhir tahapan implementasi.

Menurut Mazmanian dan Sabatier, tahapan implementasi memiliki indikator- indikator antara lain, memiliki sebuah program atau kebijakan, adanya suatu target yang menjadi sasaran pelaksanaan program dan memastikan jika mereka merupakan bagian dari penerima manfaat program yang dijalankan, kemudian hadirnya pelaksana atau implementator program yang berasal dari individu/ organisasi. Tahapan implementasi memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan aktivitas yang sejalan dengan UU yang berlaku serta memiliki keselarasan dengan upaya melanjutkan kebijakan yang telah ditentukan menjadi sebuah tindakan. Tahapan implementasi juga terkait dengan pembentukan sebuah badan atau organisasi yang memiliki tugas untuk menyalurkan manfaat dari sebuah kebijakan kepada para sasaran dan menjalankan koordinasi terkait sumberdaya yang dibutuhkan demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan.<sup>30</sup>

Berdasarkan Indikator diatas, penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti menggunakan sebuah program/ kerangka kerja global bernama *Sustainable Development Goals* (SDGS) yang memiliki 17

---

<sup>30</sup> Mazmanian and Sabatier.

tujuan, namun peneliti berfokus pada tujuan kelima yakni kesetaraan gender. Kerangka kerja SDGs no 5 tersebut kemudian dilakukan implementasinya dalam lingkup nasional oleh Kerajaan Arab Saudi. Dalam pelaksanaannya, Kerajaan Arab Saudi memberi arahan kepada kementerian yang memiliki keterkaitan perwujudan target- target kesetaraan gender yang terkandung SDGs no.5 seperti Kementerian ketenagakerjaan dalam upaya menaikkan tingkat partisipasi kerja kaum perempuan Arab Saudi, Kementerian SDM dan Pembangunan Sosial dalam upaya untuk merangkul para perempuan dan mendorongnya untuk memiliki Pendidikan yang tinggi dan luas melalui penyediaan beasiswa, pelatihan, dan lainnya, Kementerian Kesehatan dalam upayanya menyediakan fasilitas dan akses yang sama bagi perempuan melalui pendirian Klinik perempuan dan anak, menjamin akses ke program keluarga berencana dan lain sebagainya, Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi dalam upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam profesi ICT, menaikkan presentase akses perempuan ke teknologi memadai, dan lain sebagainya, Kementerian kehakiman dalam upaya meningkatkan tingkat partisipasi perempuan dalam proses peradilan kemudian menyediakan kesempatan yang sama bagi para perempuan untuk dapat bergabung dalam militer kerajaan. Kemudian dalam tahap evaluasi yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sebuah proses implementasi sebuah kebijakan/ program kerja dilakukan oleh Kementerian Ekonomi dan Perencanaan Arab Saudi melalui Badan

Statistik yang menyediakan berbagai laporan terkait pemenuhan target-target yang terkandung dalam SDGs no.5 yang menjadi fokus dari penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti.

#### 4. *Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 5*

SDGs adalah sebuah kerangka kerja global yang didalamnya termuat tujuan- tujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan demi keberlangsungan kehidupan generasi sekarang dan masa depan. Kerangka yang menjadi agenda global ini memiliki visi yang berambisi untuk melaksanakan integrasi antara 3 dimensi penting kehidupan yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan.<sup>31</sup>

Kemunculan SDGs sebagai kerangka global diawali oleh *Millenium Development Goals*. MDGS sendiri ialah sebuah hasil konsesus yang diikuti oleh 189 negara. Di dalam MDGS terdapat 8 tujuan untuk menghilangkan setiap bentuk kemiskinan di dunia dan memiliki tujuan untuk dapat tercapai pada 2015. Meski tenggat waktu awal yang direncanakan dari pemenuhan tujuan MDGs ini telah berakhir, masih banyak capaian yang belum sesuai dengan tujuan. Sehingga pada 2015, disepakati sebuah kerangka kerja yang serupa yakni dikenal dengan *Sustainable Development Goals* atau SDGs.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *The 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals an Opportunity for Latin America and the Caribbean* (Santiago: United Nations, ECLAC, 2018).

<sup>32</sup> Agus Sutopo, Dian Fitriana Arthati, and Utari Azalika Rahmi, *Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)* (Badan Pusat Statistik, 2014), <https://webapi.bps.go.id/download.php?f=yt3PIY+/inNVuqAW1DDD1VYVyxFRHHkyhhl6V6NvembEaNiTDyZB+302g1dx1/v0Z9SUio8yl6s3f64DYpAjATMDqrJ7uaBG5KMuj+cDsRHvbYt+sCx599DrwIIolnCy+Mmj1ki1bYG5IvOfglwKBAOnvhaRgLvYleUSnV/MVfidZUuP/Gwqplinh4AJIGFX1zPC9t/i0/Or7hqVR9WHDRIVrZaoRc7MmMX1LAjq3oMfpftuxfOf03NjLlGpLj7aoD6iJ+nxLEgPgKTU2t2lZPiXchxrHWD0vPX26jjQ6vE=>.

SDGs menjadi usulan sebagai agenda pembangunan global pertama kali pada tahun 2012 oleh empat negara yakni, Kolombia, Peru, Guatemala, dan Uni Emirat Arab sebelum konferensi Rio+20 dihelat. Setelah konferensi Rio 20+ dilaksanakan, sebuah resolusi dengan sebutan "*The Future We Want*". Komunitas internasional sepakat harus melaksanakan pembangunan global yang mewajibkan setiap bangsa untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan bagi manusia dan planet yang dihuninya.<sup>33</sup>

Setelah melalui proses panjang perumusan yang dilakukan oleh 30 negara anggota dalam *Open Working Group* (OWG) mulai dari 2012 yang menghasilkan 17 usulan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada 2015, 193 negara yang mengikuti *United Nations General Assembly* (UNGA) sepakat untuk menjadikan SDGs sebagai agenda 2030 dengan sebutan "*Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*". Yang memuat 17 tujuan SDGs dan termasuk 169 target serta 232 indikator didalamnya.<sup>34</sup>

Dalam *United Nations Development Program*, hal yang perlu diperhatikan adalah prinsip utama pembangunan manusia memiliki karakter yang primer yakni baik laki-laki maupun perempuan memiliki banyak pilihan dalam kehidupannya, menyadari potensi yang ada pada dirinya dan kebebasan menjalani kehidupan secara terhormat dan

---

<sup>33</sup> "Future We Want- Outcome Document" (The United Nations Conference on Sustainable Development, Rio de Janeiro, 2012).

<sup>34</sup> Agora, "Sustainable Development Goals (SDGs) Post 2015 Agenda," accessed May 16, 2024, <https://www.agora-parl.org/resources/aoe/sustainable-development-goals-sdgs-post-2015-agenda>.

berharga. Untuk mencapai prinsip utama tersebut, kesetaraan gender menjadi indikator yang tidak dapat diabsenkan kehadirannya karena baik laki-laki dan perempuan adalah substansi primer dari pembangunan manusia. Namun demikian, realitas yang ada pada pembangunan manusia di Arab Saudi masih perlu untuk diperjuangkan untuk memenuhi hak dasar manusia, seperti kesempatan Pendidikan, mendapatkan pekerjaan atau akses terhadap kesejahteraan ekonomi, akses kesehatan antara laki-laki dan perempuan perlu seimbang dan proporsional. Permasalahan di Arab Saudi dalam pembangunan nasional masih terkendala masalah struktural dan kultural, di mana karakternya masih memihak pada kaum laki-laki dalam mendapatkan akses yang dimaksud.

Oleh karena itu penelitian yang sedang dilakukan saat ini akan berusaha menelaah bagaimana Kerajaan Arab Saudi telah mengimplementasikan program program tujuan berkelanjutan khususnya pada tujuan nomor 5 yakni kesetaraan gender yang menjadi substansi primer dalam pembangunan manusia. Adapun SDGs nomor 5 memiliki 9 target yakni:

- a. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dimanapun
- b. Menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di ruang pribadi dan publik, termasuk perdagangan manusia, eksploitasi seksual dan segala bentuk eksploitasi

- c. Menghilangkan segala praktik kejahatan, seperti pernikahan dini dan pernikahan paksa, serta praktik sunat terhadap kaum perempuan
- d. Mengakui dan menghargai pekerjaan mengasuh dan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan public, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, serta peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional
- e. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, serta kesempatan yang setara untuk kepemimpinan di setiap level dari pembuatan keputusan dalam kehidupan Politik, ekonomi, dan public.
- f. Menjamin akses yang universal terhadap Kesehatan seksual dan reproduksi, serta hak untuk reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platforms* serta dokumen- dokumen hasil reuiu dari konferensi tersebut.
- g. Melakukan reformasi untuk memberikan hak yang setara kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan control atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.

- h. Meningkatkan penggunaan teknologi yang mumpuni, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan
- i. Mengadopsi dan memperkuat kebijakan dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan dalam setiap level.<sup>35</sup>

## 5. Pemberdayaan Perempuan

Istilah pemberdayaan perempuan pertama kali diungkapkan oleh seorang akademisi, John Conyers dalam terbitan artikelnya dengan judul “Toward Black Political Empowerment – Can the System be Transformed” pada 1975. Setelah artikel tersebut diterbitkan oleh Conyers, barulah beberapa teori berkenaan dengan pemberdayaan perempuan muncul ke permukaan. Pemberdayaan dalam arti yang luas merujuk pada penjabaran dari kebebasan untuk memilih dan bertindak.<sup>36</sup> Pilihan tersebut diungkapkan dalam peningkatan kemampuan untuk mengungkapkan opini, mengatur waktu sendiri, serta mendapatkan akses sepenuhnya terhadap sumber daya. Dalam aspek lain, seorang peneliti berusaha mengungkapkan bahwa pemberdayaan berarti individu, terutama mereka yang miskin mampu untuk memiliki kendali lebih atas hidup mereka, dan memiliki

---

<sup>35</sup> Department of Economic and Social Affairs, “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development,” accessed November 14, 2023, <https://sdgs.un.org/2030agenda>.

<sup>36</sup> Anju Malhotra, Sidney Ruth Schuler, and Carol Boender, “Measuring Women’s Empowerment as a Variable in International Development. In Background Paper Prepared for the World Bank Workshop on Poverty and Gender: New Perspectives,” *The World Bank* 28 (June 28, 2002).

kehidupan yang layak dengan kemampuan untuk memiliki asset dan memiliki kendali atasnya.<sup>37</sup>

Pemberdayaan perempuan juga dapat dipahami sebagai sebuah proses meningkatkan kapasitas suatu individu atau kelompok untuk dapat memilih dan memiliki kemampuan untuk mengubah pilihan tersebut menjadi sebuah aksi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.<sup>38</sup> Senada dengan pendapat tersebut, Ibrahim dan Alkire, mengungkapkan bahwa pemberdayaan berkenaan dengan sejauh mana beberapa kelompok individu mampu untuk menentukan takdir mereka, meski kepentingan mereka bertentangan dengan kebenaran yang dipegang oleh orang-orang disekeliling mereka.<sup>39</sup>

Juga senada dengan dua pendapat sebelumnya, Bartlett melihat pemberdayaan sebagai sebuah proses meningkatkan kemampuan individu untuk membuat keputusan mereka sendiri, dibandingkan dengan individu tersebut menjadi objek yang pasif, dan keputusan dibuat atas mereka.<sup>40</sup> Upaya-upaya pemberdayaan ini lebih focus pada level individu, dikarenakan pemberdayaan berada dan berasal dari tingkat individu.

---

<sup>37</sup> Robert Chambers, *Challenging the Professions: Frontiers for Rural Development*, Reprint (London: Intermediate Technology Publ, 2002).

<sup>38</sup> Maimunah Ismail, Roziah Mohd Rasdi, and Akhmal Nadirah Abd. Jamal, "Gender Empowerment Measure in Political Achievement in Selected Developed and Developing Countries," *Gender in Management: An International Journal* 26, no. 5 (July 19, 2011): 380–92, <https://doi.org/10.1108/17542411111154912>.

<sup>39</sup> Solava Ibrahim and Sabina Alkire, "Agency and Empowerment: A Proposal for Internationally Comparable Indicators," *Oxford Development Studies* 35, no. 4 (December 2007): 379–403, <https://doi.org/10.1080/13600810701701897>.

<sup>40</sup> Andrew Bartlett, "Entry Points For Empowerment :A Report For CARE Bangladesh," June 2004, [https://www.carebangladesh.org/upload/files/Publication\\_87893.pdf](https://www.carebangladesh.org/upload/files/Publication_87893.pdf).

Mosedale mengungkapkan bahwa pemberdayaan ini tidak bisa diberikan kepada pihak ketiga, namun mereka yang ingin diberdayakan harus mengklaimnya sendiri.<sup>41</sup>

Dalam upaya mengonseptualisasikan istilah pemberdayaan. Beberapa indicator untuk mengukur pemberdayaan telah diajukan oleh Naila Kabeer seperti :

*a. Agency*

Merujuk pada kebebasan individu untuk melibatkan dirinya dalam tahapan pembuatan keputusan penting atas hidup mereka. Kabeer mengungkapkan bahwa agensi ialah sebuah kemampuan individu untuk menentukan tujuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk mencapainya.<sup>42</sup>

*b. Resources*

Merujuk pada kemampuan individu untuk dapat meraih peluang pemberdayaan melalui aspek materiil dan juga kesempatan untuk membangun koneksi dengan individu lain, termasuk juga harapan akan masa depan seorang individu. Sumberdaya bukan hanya sekadar kebutuhan materiil seperti finansial dan moneter, melainkan juga sumberdaya manusia (spt. Pendidikan, keterampilan, pelatihan, dll), modal

---

<sup>41</sup> Sarah Mosedale, "Assessing Women's Empowerment: Towards a Conceptual Framework," *Journal of International Development* 17, no. 2 (March 2005): 243–57, <https://doi.org/10.1002/jid.1212>.

<sup>42</sup> Naila Kabeer, "Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment," *Development and Change* 30, no. 3 (July 1999): 435–64, <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>.

finansial (Pinjaman, tabungan), modal sosial (Koneksi, Mentor, dll), modal fisik (tanah, mesin, dll)

*c. Achievement*

*Achievement* ialah produk dari sebuah agensi yang telah dijalankan. Dalam prosesnya, jika proses agency dijalankan dengan baik oleh individu maka akan menghasilkan sebuah *achievement* yang dapat melahirkan peningkatan kepercayaan terhadap diri suatu individu, yang juga akan memberikan kemampuan untuk individu ini untuk mempengaruhi kehidupan yang berjalan disekitarnya.

*d. Opportunity Structure*

*Opportunity structure* atau struktur peluang mempengaruhi tiga hal yang telah dipaparkan diatas. Sering juga disebut sebagai struktur kelembagaan yang dapat dipahami sebagai sebuah “aturan main” atau sebuah sistem sosial yang mengatur aktivitas dan menjadi jembatan antara individu dengan lingkungan sosial dan ekonomi yang mereka hadapi.<sup>43</sup> Struktur peluang juga disadari lebih luas dari sebuah norma atau peraturan yang hadir secara formal maupun informal didalam konteks kelembagaan, dan politik, dimana para aktor yang hadir didalamnya tergerak oleh keinginan untuk memenuhi kepentingan mereka.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Erin Markel, “Measuring Women’s Economic Empowerment in Private Sector Development: Guidelines for Practitioners,” *DCED*, July 2014.

<sup>44</sup> Emma Samman and Maria Emma Santos, “Agency and Empowerment: A Review of Concepts, Indicators and Empirical Evidence,” *Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI)*, 2009, <https://ophi.org.uk/ophi-research-paper-10a/>.

## **B. Kerangka Konseptual**

### **1. Norma Internasional**

Menurut Florini, norma internasional dapat dipahami sebagai suatu aturan yang didalamnya terdapat negara- negara yang berperan untuk menjalankan aturan yang telah disepakati. Perilaku dari sebuah negara dapat berubah disebabkan oleh sebuah norma, hal ini terjadi akibat dari hadirnya suatu aturan yang harus dijalankan dan dipatuhi agar sebuah norma yang dibangun dapat terpenuhi tujuannya.<sup>45</sup> Masyarakat akan mengakui sebuah norma yang hadir diantaranya apabila norma tersebut sesuai dengan kondisi yang dihadapkan pada mereka, dan mereka akan memberi respon baik atas kehadiran norma tersebut.

Secara umum, norma dapat dibedakan menjadi 2 jenis yakni norma berbentuk regulasi yang memberikan batasan- batasan terhadap perilaku masyarakat, dan norma konstitutif yang memberi legitimasi akan aktor- aktor, kepentingan, atau isu terbaru. Dalam kajian hubungan internasional, Finnemore dan Skikkink mengkategorikan norma menjadi dua yakni norma domestik dan norma internasional. Norma domestik sangat terikat dengan norma internasional. Banyak norma internasional yang telah hadir saat ini berawal dari sebuah norma domestik yang kemudian menjadi norma internasional yang

---

<sup>45</sup> Ann Florini, "The Evolution of International Norms," *International Studies Quarterly* 40, no. 3 (September 1996): 363, <https://doi.org/10.2307/2600716>.

disebabkan oleh usaha para aktor didalamnya.<sup>46</sup> Norma internasional sendiri adalah suatu norma yang memberi petunjuk berkenaan dengan perilaku yang harus diadaptasi oleh suatu negara berdasarkan kesepakatan yang telah dilakukan.

Finnemore dan Sikkink membangun sebuah skema yang dapat menjelaskan 3 tahapan siklus bagaimana norma internasional dapat terbentuk. Tahap pertama ialah *emergence of norms*, diawali dengan usaha pembingkaiannya sebuah isu atau intensi oleh para aktor yang akan dicanangkan menjadi sebuah norma internasional, kemudian para aktor akan memperkenalkan norma yang dicanangkan secara luas kepada khalayak secara persuasif dan meyakinkan mereka tentang pedoman yang diatwarkan oleh norma tersebut di masa depan.

Tahap kedua dalam pembentukan norma adalah *Norm cascade*, tahapan ini dapat dipahami sebagai tahap penyebarluasan norma yang telah dibentuk. Norma yang telah dibentuk akan dilakukan penyebarluasan melalui sosialisasi secara internasional. Proses ini memiliki tujuan untuk menyiarkan norma yang telah terbentuk ke seluruh dunia, penyebarannya umumnya dilakukan melalui jaringan antar negara ataupun melalui sebuah organisasi internasional seperti PBB. Dalam tahap ini akan terjadi hubungan diplomatik antar negara sebagai aktor sosialisasi norma, dan ketika norma sudah dipahami dan diterima oleh sebuah negara, negara tersebut akan melakukan kajian

---

<sup>46</sup> Martha Finnemore and Kathryn Sikkink, "International Norm Dynamics and Political Change," *International Organization* 52, no. 4 (1998): 887–917, <https://doi.org/10.1162/002081898550789>.

berkenaan dengan bagaimana untuk menyiarkan norma tersebut pada skala nasional.

Tahap ketiga, atau tahap terakhir dalam siklus pembentukan norma adalah internalisasi. Saat norma telah melalui tahap *Norm Cascade*, norma berada pada puncak berdasarkan isu atau kepentingan yang hadir, dan hal ini akan membuat norma mudah diterima oleh khalayak sehingga negara sebagai aktor akan lebih mudah melakukan internalisasi. Dalam proses internalisasi ini lebih menekankan pada proses yang dilakukan oleh pemangku kebijakan dalam sebuah negara atau sebuah birokrasi agar sebuah norma dapat diimplementasikan dalam kebijakan dalam negeri.<sup>47</sup> Dalam prosesnya, pembentukan norma internasional akan melahirkan sejumlah usaha- usaha ratifikasi oleh berbagai institusi akan keabsahan dari norma yang diciptakan. Hal ini terjadi dikarenakan norma sendiri diciptakan oleh para aktor rasional yang berusaha memaksimalkan penerimaan norma oleh khalayak.

### C. Argumentasi utama

Dalam penelitian yang sedang dilakukan, peneliti ber- argument bahwa Kerajaan Arab Saudi telah melakukan beberapa komitmen nyata dalam implementasi SDGs, khususnya pada poin nomor 5, dimana kesetaraan gender untuk perempuan mulai ditampakkan pada aspek- aspek kehidupan dalam masyarakat arab Saudi, baik itu dalam ranah pribadi,

---

<sup>47</sup> Finnemore and Sikkink.

seperti kebebasan untuk menentukan pasangan hidupnya, maupun dalam kehidupan public seperti kebebasan untuk bekerja



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Problema Penelitian

Dalam penelitian yang sedang dilakukan, peneliti berupaya untuk memahami fenomena yang sedang terjadi, oleh karena itulah penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pertanyaan deskriptif, dengan intensi untuk memahami fenomena yang sedang terjadi, kemudian akan dilakukan pendeskripsian dalam bentuk tulisan.

Penelitian kualitatif ialah sebuah penelitian yang memiliki output data- data yang tertuang dalam kata kata/ tulisan dari sebuah fenomena yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).<sup>48</sup>

Dikarenakan penelitian ini membutuhkan penjelasan yang tidak memerlukan data berupa perhitungan melainkan lebih membutuhkan penjelasan berupa kata-kata dan bahasa untuk itulah jenis penelitian kualitatif dipilih. Dengan kata lain, penelitian ini lebih menekankan penjelasan bersifat deskriptif maupun naratif dalam penyajian data-datanya. Selain itu, penelitian ini termasuk penelitian sosial yang membutuhkan keterangan berupa peristiwa, tindakan serta interaksi sosial yang bersifat alamiah dalam pengambilan data subjek yang diteliti.

---

<sup>48</sup> Lexy J. Meleong, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989).

## **B. Unit dan Peringkat Analisis**

Dalam buku Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi karya Mochtar Mas'ood dijelaskan setidaknya terdapat 5 tingkat analisa yang dapat digunakan dalam menganalisis suatu fenomena. yaitu: a). Tingkat Individu yang berfokus pada tingkah laku dan sikap para pembuat kebijakan, seperti kepala pemerintah, menteri, pimpinan militer, dan lain sebagainya. Asumsi pada tingkat ini adalah perilaku dari individu yang saling berinteraksi akan mengakibatkan muncul suatu fenomena dalam hubungan internasional. b). Tingkat Kelompok yang berfokus pada perilaku kelompok kecil seperti kabinet, dewan keamanan, politibiro dan lain sebagainya atau organisasi yang terlibat dalam hubungan internasional. Asumsinya individu melakukan perilaku hubungan internasional dalam suatu kelompok. c). Tingkat Negara-bangsa yang berfokus pada proses pembuatan tentang keputusan hubungan internasional yaitu politik luar negeri yang menjadi suatu unit utuh dengan negara-bangsa. Asumsinya semua negara-bangsa akan membuat suatu keputusan yang sama jika mengalami permasalahan atau isu yang sama. Analisa harus ditekankan pada negara-bangsa karena dalam realita nya hubungan internasional dipengaruhi oleh perilaku negara-bangsa. d). Tingkat kelompok negara- negara, dalam hubungan internasional negara-bangsa tidak bertindak sendiri melainkan ada kelompok-kelompok yang terjalin. Fokus pada tingkat ini adalah kelompok-kelompok baik di lingkup regional maupun global, seperti aliansi, persekutuan ekonomi dan perdagangan, pengelompokan dalam PBB dan lain sebagainya. e). Tingkat

sistem internasional yang mempunyai peran penting dalam hubungan internasional karena akan mempengaruhi perilaku serta tindakan dari para aktor hubungan internasional.<sup>49</sup> Tingkat analisis yang digunakan dalam penelitian ini berada pada tingkat negara- bangsa, karena fokus penelitian berfokus pada bagaimana Arab Saudi sebagai negara melakukan implementasi SDGs no.5.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data- data yang diperoleh melalui berbagai dokumen sebagai sumber data. Teknik yang dipilih oleh peneliti ini biasa dikenal dengan istilah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) adalah upaya menghimpun informasi/ data yang bersesuaian dengan topik/isu penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti melalui buku- buku ilmiah, laporan penelitian. Karya tulis ilmiah, ketetapan- ketetapan, tesis, dan disertasi, hingga sumber- sumber tertulis baik secara elektronik maupun tercetak.<sup>50</sup> Dalam hal ini, peneliti melakukan dokumentasi melalui sumber data primer yang diperoleh langsung dari publikasi kerajaan yakni melalui website resmi Badan Statistik Kerajaan Arab Saudi yang melaporkan berbagai kondisi pemberdayaan perempuan dari tahun ke tahun, kemudian Website resmi *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk melihat apa saja target dari SDGs no.5 yang memiliki intensi mewujudkan kesetaraan gender di seluruh dunia.

---

<sup>49</sup> Mohtar Mas'ood, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis Dan Teorisasi* (Yogyakarta PAU-SS-UGM, 1989).

<sup>50</sup> Syaibani, R, "Studi Kepustakaan," *Universitas Sumatera Utara*, 2012.

Selain penggunaan data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Data sekunder ini berarti bahwa data tersebut tak diperoleh dari pihak yang terkait, namun berasal dari tulisan- tulisan baik didalam maupun diluar jaringan. Adapun sumber data sekunder yang dimaksud seperti kutipan Dekrit Kerajaan yang diperoleh melalui portal berita Arab Saudi (Al-Jazeera), kemudian artikel- artike dan buku buku yang membahas hak- hak perempuan, khususnya di Arab Saudi, serta berita- berita yang terkait dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Setelah data berhasil dikumpulkan oleh peneliti, tahap selanjutnya ialah melakukan Analisa terhadap data tersebut. Adapun pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Analisis data interaksionis yang dikenalkan oleh Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman terdapat 3 alur proses Analisa data, sebagai berikut:<sup>51</sup>

##### **a. Reduksi Data (Kondensasi)**

Reduksi data adalah sebuah proses memilih, menyederhanakan, dan mentransformasikan data yang diperoleh secara mentah baik dari tulisan, literatur empiris, hasil wawancara, makalah, dan lain sebagainya. Proses ini akan berlanjut selama penelitian dilakukan, bahkan sebelum pengumpulan data dilakukan, sebagaimana dibuktikan

---

<sup>51</sup> Matthew B. Miles and Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode- Metode Baru* (Jakarta: UI Press, 2007).

oleh kerangka penelitian konseptual, masalah penelitian, dan pendekatan yang dipilih oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengambilan data yang diperoleh dari Badan Statistik Arab Saudi berkenaan dengan kondisi pemberdayaan perempuan di Arab Saudi dalam berbagai aspek seperti pekerjaan, kesehatan, subsidi dan lain-lain, kemudian melalui website resmi *Sustainable Development Goals* (SDGs) berkenaan dengan tujuan tujuan dari SDGs itu sendiri, Kemudian peneliti melakukan penyederhanaan data dan fokus terhadap Komitmen Kerajaan Arab Saudi Dalam Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Nomor 5 Untuk Menjamin Pemberdayaan Perempuan.

#### **b. Penyajian Data**

Setelah reduksi data telah selesai dilakukan, tahap selanjutnya ialah peneliti menyajikan data- data yang telah ter-reduksi. Adapun penyajian data ini dilakukan dengan menggunakan teks secara naratif dan deskriptif. Beberapa data yang telah tereduksi seperti Jumlah pekerja perempuan yang diperoleh melalui Badan Statistik Arab Saudi, data berkenaan dengan penggunaan program berencana bagi perempuan berkeluarga, kemudian jumlah perempuan yang telah menikah dan bercerai, data penggunaan teknologi ICT oleh kaum perempuan, data kepemilikan lahan pertanian oleh kaum perempuan, kemudian data penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi perempuan dimuat untuk mendukung penelitian yang dilakukan

peneliti yang berusaha menggambarkan Komitmen Kerajaan Arab Saudi Dalam Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Nomor 5 Untuk Menjamin Pemberdayaan Perempuan.

### c. Penarikan Kesimpulan

Untuk melanjutkan penelitian secara menyeluruh, dilakukan penarikan kesimpulan dan penelaahan bukti yang konsisten dan valid.<sup>52</sup> Tahap ini dilakukan dengan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh dari proses penelitian yang telah dianalisis. Tujuannya yaitu agar mempermudah peneliti dalam mengetahui jawaban dari pertanyaan pada fokus penelitian.

### E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam memeriksa keabsahan data- data yang hadir dalam penelitian ini, peneliti melakukan teknik triangulasi. Triangulasi sendiri dapat dipahami sebagai sebuah cara validasi kualitatif secara silang. Peneliti melakukan triangulasi sumber, atau dengan kata lain menghimpun data dari beberapa sumber berbeda.<sup>53</sup> Peneliti akan melakukan uji keabsahan data yang peneliti dapatkan dari website resmi Badan Statistik Kerajaan Arab Saudi dan website resmi SDGs.

---

<sup>52</sup> Ahmad Rijali, "ANALISIS DATA KUALITATIF," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (January 2, 2019): 81, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

<sup>53</sup> Meleong, *Metologi Penelitian Kualitatif*.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Pemberdayaan Perempuan oleh Kerajaan Arab Saudi

Komunitas internasional telah menyepakati sebuah norma *Sustainable Development Goals (SDGs)* untuk mewujudkan Agenda 2030 yang berusaha mencapai 3 aspek penting dalam kehidupan manusia yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui sebuah resolusi Majelis Umum PBB No. 70/1 pada 2015. Penelitian yang sedang dilakukan saat ini berfokus pada tujuan kelima yakni kesetaraan gender yang dapat dicapai melalui aspek pemberdayaan perempuan.

Pemberdayaan perempuan menjadi aspek yang terus digencar oleh Kerajaan Arab Saudi, oleh karena itu peluang yang lebih besar telah diberikan pada kaum perempuan Saudi untuk dapat membangun kemampuan yang mereka miliki serta untuk menggunakannya demi tercapainya tujuan tertentu. Simpati yang mulai tumbuh atas Kaum perempuan ini telah menunjukkan betapa peduli kerajaan terhadap pemberdayaan kaum perempuan, yang selama ini telah membuat kaum perempuan memiliki ruang gerak yang terbatas dan terkurung dalam belenggu kehidupan rumah tangga.

Kerajaan Arab Saudi juga secara gamblang menyatakan dukungan dan komitmen nyata untuk memberikan kesempatan yang sama bagi segenap entitas masyarakat Arab Saudi, khususnya perempuan melalui pernyataan yang tertuang dalam Arab Vision 2030 sebagai berikut:

*“Saudi women are yet another great asset. With over 50 percent of our university graduates being female, we wil continue to develop their talents, invest in their productive capabilities and enable them to strengthen their future and contribute to the development of our society and economy”<sup>54</sup>*

Adapun pernyataan gamblang dari Kerajaan dalam vision 2030 tersebut selaras dengan Norma SDGs khususnya nomor 5 yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender bagi seluruh perempuan di dunia, dab salah satu upaya perwujudan kesetaraan gender dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi melalui pemberdayaan kepada para perempuan yang dapat dilihat dari beberapa sektor kehidupan seperti:

#### **1. Pemberdayaan perempuan dalam sektor pekerjaan**

Dalam intensi menghilangkan diskriminasi perempuan dalam bidang pekerjaan, beberapa upaya telah dilaksanakan oleh kerajaan Arab Saudi. Pertama, kerajaan telah mengesahkan sebuah undang undang untuk mempekerjakan perempuan dibawah sistem ketenagakerjaan Arab Saudi yang tertuang dalam Bab 9 UU Ketenagakerjaan. Adapun bab tersebut berisi 10 pasal seperti berikut terlihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Bab 9 UU Ketenagakerjaan Kerajaan Arab Saudi

Pasal	Isi
149	- Perempuan dibolehkan untuk bekerja di segala bidang yang sesuai dengan

<sup>54</sup> Kingdom of Saudi Arabia, “Vision 2030,” 2016, [https://www.vision2030.gov.sa/media/rc0b5oy1/saudi\\_vision203.pdf](https://www.vision2030.gov.sa/media/rc0b5oy1/saudi_vision203.pdf).

	<p>kodratnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perempuan dilarang bekerja dalam pekerjaan atau industry yang berbahaya bagi Kesehatan atau diri perempuan itu sendiri</li> </ul>
150	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wanita dilarang bekerja hingga malam hari dan tidak lebih dari 11 jam berturut-turut, kecuali dalam pengecualian yang dikeluarkan oleh menteri</li> </ul>
151	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perempuan yang bekerja berhak untuk mendapatkan cuti melahirkan 4 minggu sebelum tanggal kemungkinan kelahiran, dan enam minggu setelah kelahiran</li> </ul>
152	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perempuan yang sedang cuti melahirkan berhak atas setengah gaji yang biasanya ia dapatkan (Masa kerja 1 tahun atau lebih)</li> <li>- Perempuan yang sedang cuti melahirkan berhak atas gaji penuh (Masa kerja 3 tahun atau lebih)</li> </ul>
153	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Majikan diwajibkan untuk memberikan perawatan medis kepada pekerja perempuan dimasa kehamilan dan persalinan</li> </ul>
154	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekerja perempuan memiliki hak untuk Kembali bekerja setelah masa cuti melahirkan telah selesai</li> <li>- Pekerja perempuan dibolehkan untuk istirahat dengan tujuan menyusui bayinya, tanpa ada konsekuensi pengurangan upah dan sejenisnya</li> </ul>
155	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Majikan tidak diperbolehkan untuk memecat pekerja perempuan ketika ia sedang cuti hamil dan persalinan</li> </ul>
156	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Majikan tidak boleh memberhentikan pekerjaanya jika selama kehamilannya ia sakit</li> </ul>

157	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekerja perempuan akan kehilangan atas hak- haknya jika dalam masa cuti resmi yang ia ambil, ia bekerja pada majikan lain. Dan majikan awal diberikan wewenang untuk mencabut gajinya selama masa cuti atau pemulihan yang telah ia ambil.</li> </ul>
158	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Majikan yang mempekerjakan perempuan di semua profesi diwajibkan untuk menyediakan tempat duduk untuk menjamin istirahat para pekerja perempuan selama masa istirahat</li> </ul>
159	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Majikan yang mempekerjakan 50 pekerja perempuan atau lebih wajib menyediakan tempat serta pengasuh anak (Jika jumlah anak dari para pekerja perempuan dengan umur kurang dari 6 tahun mencapai 10 anak atau lebih)</li> <li>- Perusahaan yang mempekerjakan 100 atau lebih pekerja perempuan di satu kota yang sama diwajibkan untuk mendirikan tempat penitipan anak sendiri atau bekerja sama dengan tempat penitipan anak yang sudah ada untuk memberikan fasilitas penitipan anak bagi para anak dari pekerja perempuan yang berumur kurang dari 6 tahun</li> </ul>
160	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekerja perempuan yang suaminya mengalami kematian berhak untuk cuti dengan upah yang dibayarkan secara penuh untuk waktu sekurang-kurangnya 15 hari sejak tanggal kematian suaminya.<sup>55</sup></li> </ul>

Sumber: Labor Law (Royal Decree No. M/51)

<sup>55</sup> "Labor Law (Royal Decree No. M/51)," accessed February 15, 2024, <https://laboreducation.mlssd.gov.sa/sites/default/files/2022-01/Labor.pdf>.

Kedua, selain telah menyediakan proteksi bagi kaum perempuan yang bekerja, kerajaan Arab Saudi juga membuat sebuah portal daring sebagai wadah bagi individu, organisasi, institusi atau yang lain untuk melaporkan atau memberikan complain terkait kejahatan akan poin-poin yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Adapun portal daring yang dimaksud dapat diakses melalui laman web Kementerian Ketenagakerjaan Arab Saudi di <https://www.hrsd.gov.sa/ministry-services/services/1155111>.

Ketiga, Kerajaan melalui *Human Resources Development Fund* (HRDF) telah menginisiasi program subsidi yang memiliki intensi utama untuk memberikan subsidi gaji tambahan dalam proses rekrutmen pekerja. Bantuan subsidi diberikan dalam tambahan gaji dalam proses rekrutmen pekerja perempuan, pekerja dengan disabilitas, rekrutmen pekerja di desa dan kota kecil, rekrutmen di bisnis skala kecil dan sedang, dan rekrutmen dalam profesi-profesi berbahaya. Mulai dari 2018 hingga kuartal 3 2021, sebanyak 115.491 perempuan telah mendapatkan manfaat dari program subsidi ini.<sup>56</sup>

Keempat, menginisiasi program Qurrah, dibawah HRDF yang menjadi sebuah program perantara antara pusat penitipan anak dan orang tua (perempuan) yang bekerja. Program ini telah memberi dukungan kepada para pekerja perempuan yang memiliki anak melalui pemberian subsidi biaya penitipan anak sebesar SAR 800 tiap bulannya untuk setiap

---

<sup>56</sup> Ministry of Finance, "Women's Empowerment Initiative Within the Saudi Annual Budget," accessed March 20, 2024, <https://www.mof.gov.sa/en/budget/2023/Documents/Women%20Empowerment.pdf>.

anak dalam periode waktu 4 tahun. Adapun syarat utama untuk para pekerja perempuan agar dapat menerima manfaat bantuan subsidi Qurrah ini antara lain: berkewarganegaraan Saudi, penghasilan bulanan rumah tangga dibawah SAR 8000, Terdaftar dalam asuransi sosial, batas umur anak penerima manfaat ialah 6 tahun.<sup>57</sup> Dalam kurun waktu mulai dari 2018 hingga kuartal 3 2021, diperkirakan 5.240 pekerja perempuan telah menerima manfaat dari program Qurrah ini.<sup>58</sup>

Kelima, HRDF juga memberikan bantuan subsidi untuk mobilitas para pekerja perempuan melalui Wusool, sebuah program subsidi transportasi untuk para perempuan bekerja yang mencakup 13 wilayah di Kerajaan. Program ini disediakan oleh Human Resources Development Fund (HRDF) untuk mendukung para pekerja perempuan. subsidi sebesar 80% untuk setiap perjalanan, ke dan dari tempat kerja mereka dengan maksimal subsidi sebesar 1.100 SAR tiap bulannya. Wusool diluncurkan sebagai bagian dari upaya Kerajaan yang bertujuan untuk menemukan solusi guna mengurangi biaya transportasi bagi perempuan Saudi yang bekerja di sektor swasta, sekaligus memastikan bahwa lingkungan transportasi ke dan dari tempat kerja ditingkatkan dengan terus menjamin keselamatan dan keselamatan kerja yang tinggi. layanan transportasi

---

<sup>57</sup> Human Resources Development Fund, "Program for Supporting Hospitality for Children (Qurrah) : Guide for Parents," 2023, [https://rum.hrdf.org.sa/media/bleki5ag/222%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A9\\_compressed-1.docx](https://rum.hrdf.org.sa/media/bleki5ag/222%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A9_compressed-1.docx).

<sup>58</sup> Ministry of Finance, "Women's Empowerment Initiative Within the Saudi Annual Budget."

berkualitas yang disediakan melalui kemitraan dengan layanan ride-hailing yang telah dilakukan akreditasi oleh Kementerian Perhubungan<sup>59</sup> seperti *Uber*. Dalam kurun waktu mulai dari November 2017 hingga September 2022, diperkirakan lebih dari 168.000 pekerja perempuan telah menerima manfaat dari subsidi ini, dan dalam kurun waktu yang sama, total perjalanan yang didukung oleh program Wusool ini diperkirakan lebih dari 30 Juta perjalanan.<sup>60</sup>

Dengan segenap perlindungan yang diinisiasi oleh Kerajaan kepada kaum perempuan seperti yang telah diuraikan diatas terbukti telah meningkatkan presentase dari kaum mereka untuk menjadi pekerja. Berdasarkan data *Labor Force Survey* yang dikeluarkan oleh Badan Umum Statistik dibawah Kementerian Ekonomi dan Perencanaan Arab Saudi pada tahun 2015, Pekerja perempuan saudi pada berbagai sector dengan rentang usia 19-65 Tahun berjumlah **816.361** individu.<sup>61</sup> Pada kuartal 1 tahun 2016, jumlah ini meningkat menjadi **830.630** pekerja perempuan.<sup>62</sup> Kemudian pada kuartal 4 tahun 2018 jumlah ini meningkat menjadi **1.070.457** individu. <sup>63</sup> Jumlah ini pun kian meningkat hingga mencapai **1.582.224** perempuan saudi telah menjadi pekerja pada laporan

---

<sup>59</sup> Saudi Arabia's National Unified Portal for Government Services and Information, "Working Women Transportation (Wusool)," Women Empowerment, n.d., <https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/careaboutyou/womenempowering>.

<sup>60</sup> Saudi Press Agency, "Hadaf: 168,000 Beneficiaries of Transportation Support Program (Wusool)," October 9, 2022, <https://www.spa.gov.sa/2390912>.

<sup>61</sup> General Authority for Statistics, "Labor Force Survey 2015 2nd Half," 2015, <https://www.stats.gov.sa/en/4118>.

<sup>62</sup> "Labor Market Fourth Quarter 2016" (General Authority For Statistics, 2016), <https://www.stats.gov.sa/en/5288>.

<sup>63</sup> General Authority for Statistics, "Labour Market, Fourth Quarter 2018," 2018, [https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/lm\\_2018\\_q4%20v2\\_0.xlsx](https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/lm_2018_q4%20v2_0.xlsx).

terakhir yang dipublikasikan oleh Badan Statistik pada kuartal 4 tahun 2023.<sup>64</sup>

## **2. Pemberdayaan Perempuan dalam Peningkatan Kapasitas**

Salah satu inisiatif pelatihan yang dicanangkan oleh kerajaan ialah pelatihan kepemimpinan yang bekerja sama dengan Universitas *Princess Noura* dan Institut INSEAD. Pelatihan tersebut diluncurkan oleh Kementerian SDM dan Pembangunan Sosial Kerajaan Arab Saudi dengan target para pemimpin dan pekerja perempuan yang diharapkan untuk menduduki posisi kepemimpinan dalam berbagai sector. Pelatihan ini juga bertujuan untuk menyediakan dan mempersiapkan para calon pemimpin perempuan dengan berbagai pengetahuan kepemimpinan agar dapat tercipta situasi yang ideal dalam setiap pengambilan keputusan oleh mereka nantinya.

Kementerian SDM dan Pembangunan Sosial Kerajaan Arab Saudi juga menginisiasi program pelatihan parallel, yang bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada para perempuan yang belum bekerja seperti para mahasiswa yang belum lulus agar mereka dapat memenuhi kriteria-kriteria yang dibutuhkan pasar nantinya, dan juga untuk meningkatkan skill mereka. Jika para peserta pelatihan parallel ini telah selesai

---

<sup>64</sup> General Authority for Statistics, "Registered- Based Labour Market Statistics- Q4, 2023," 2023, <https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/Register-based%20Labour%20Market%20Statistics-%20Q4%202023%20En.xlsx>.

menjalankan program pelatihan maka mereka akan sertifikat yang diakui sebagai bukti mereka telah siap dan memenuhi kriteria pekerjaan.<sup>65</sup>

Selain dalam bidang pelatihan, Intensi kerajaan untuk memberdayakan semua segmen masyarakat juga dilakukan dalam segmen Pendidikan oleh karena itu Kerajaan Arab Saudi telah menjamin akses ke Pendidikan yang setara dan dibebaskan dari biaya untuk semua masyarakatnya tanpa adanya diskriminasi.

Adapun upaya tersebut dilakukan untuk memungkinkan para perempuan untuk memiliki Pendidikan yang tinggi dan luas dan nantinya diharapkan bahwa mereka mampu untuk berpartisipasi lebih secara ekonomi dengan Pendidikan yang tinggi dan juga tentu untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya bagi para perempuan. Saat ini, perempuan di Arab Saudi diperbolehkan untuk mendaftar di sekolah public dan juga memiliki hak untuk mengajukan beasiswa untuk studi di luar negeri layaknya seorang laki-laki. Berdasarkan data yang diperoleh dari *Saudi Women's Report 2022*, sebanyak 37.907 perempuan telah menerima beasiswa untuk melakukan studi di luar negeri pada 2019. Dari jumlah tersebut, penerima beasiswa baru sebanyak 4.713 perempuan, kemudian 28.934 perempuan penerima

---

<sup>65</sup> Ministry of Human Resources and Social Development, "MHRSD Signs (25) Training Agreements and Training Partnerships at the Global Labor Market Conference," December 31, 2023, <https://www.hrsd.gov.sa/en/media-center/news/141220233>.

beasiswa yang sedang aktif menjalankan studi, dan 4.260 perempuan penerima beasiswa telah menyelesaikan studinya.<sup>66</sup>

### 3. **Pemberdayaan Perempuan Dalam Aspek Kesehatan**

Kerajaan Arab Saudi telah menunjukkan komitmen nyata dalam perwujudan kesetaraan bagi kaum perempuan untuk mendapatkan akses yang sama ke fasilitas Kesehatan. Melalui Kementerian Kesehatan, kerajaan telah menciptakan klinik Kesehatan khusus bagi perempuan dan anak-anak. Klinik ini menyediakan layanan Kesehatan komprehensif (pencegahan, dan penyembuhan) bagi pada perempuan yang mengidap penyakit kronis dan memberikan prioritas lebih pada mereka, karena demi mengurangi dampak yang lebih besar seperti kematian, kesakitan, bahkan dampak ekonomi bagi keluarga penderita penyakit. Klinik tersebut juga menyediakan layanan Kesehatan bagi anak-anak seperti pemberian dan monitoring vaksin. Klinik ini juga menyediakan layanan preventif, deteksi dini dan pengobatan penyakit kronis sehingga komplikasi yang ditimbulkan dapat dikurangi dan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan penyembuhan.<sup>67</sup> Menurut data yang dimuat dari laporan “*Women’s Empowerment Initiative Within the Saudi Annual Budget*” yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Kerajaan Arab Saudi, sebanyak 11.370.036 perempuan dan anak-anak telah mendapat manfaat dari

---

<sup>66</sup> General Authority for Statistics, “Saudi Women’s Report 2022,” accessed December 15, 2024, [https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/Saudi\\_Women%27s\\_Report\\_2022\\_EN.pdf](https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/Saudi_Women%27s_Report_2022_EN.pdf).

<sup>67</sup> Ministry of Health, “Child and Woman Health Clinics,” July 29, 2019, <https://www.moh.gov.sa/en/Ministry/Projects/Women-and-Child-Health-Clinics/Pages/default.aspx>.

hadirnya Klinik tersebut sejak peresmiannya pada 2019 hingga September 2022.<sup>68</sup>

#### **4. Pemberdayaan Perempuan Dalam Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Melalui program Transformasi Nasional, kerajaan Arab Saudi memiliki keinginan besar untuk mengembangkan ekonomi digital yang diharapkan memberikan peningkatan pada pangsa pasar ekonomi digital yang dapat membantu ketergantungan PDB Arab Saudi terhadap minyak bumi dapat berkurang nantinya.<sup>69</sup>

Dibawah komando kerajaan, Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi telah berupaya untuk memberdayakan perempuan melalui peningkatan kesadaran digital, memberi pelatihan untuk meningkatkan keterampilan digital para perempuan, memberi kesempatan yang lebih banyak bagi para perempuan untuk dapat bekerja di sector teknologi dan informasi, dan meningkatkan keterampilan mereka untuk dapat menduduki posisi kepemimpinan dalam sector ini.<sup>70</sup>

Kerajaan telah berhasil menaikkan persentase partisipasi dari perempuan dalam dunia profesi ICT menjadi 30.49% melalui pelaksanaan berbagai program untuk memberi dukungan pada perempuan dalam sector ini. Sebanyak 30.232 perempuan juga telah menjadi subjek pelatihan

---

<sup>68</sup> Ministry of Finance, "Women's Empowerment Initiative Within the Saudi Annual Budget."

<sup>69</sup> Vision 2030, "National Transformation Program Delivery Plan 2021-2025" (Kingdom Of Saudi Arabia), accessed March 21, 2024, [https://www.vision2030.gov.sa/media/nhyo0lix/ntp\\_eng\\_opt.pdf](https://www.vision2030.gov.sa/media/nhyo0lix/ntp_eng_opt.pdf).

<sup>70</sup> Ministry of Communications and Information Technology, "Women's Empowerment," accessed March 21, 2024, <https://www.mcit.gov.sa/en/womens-empowerment>.

sebagai bagian dari “*Future Skills Initiative*” yang dicanangkan oleh kerajaan. Kemudian 15.311 perempuan diantaranya berhasil di rekrut dan mendapatkan pekerjaan tetap.<sup>71</sup>

Kementerian komunikasi dan teknologi informasi kerajaan juga telah meluncurkan program *Technology Pioneers* edisi kedua, yang bertujuan untuk meningkatkan peran wirausahawan dalam sector teknologi untuk berkontribusi pada pengembangan model bisnis mereka dan memberikan peluang nyata untuk para wirausahawan ini menemukan pasar- pasar baru inovatif melalui penyediaan dukungan dari kementerian secara teknis, administratif, dan finansial. Dukungan tersebut diberikan melalui penawaran paket keuangan dan teknis yang setara dengan SAR 150.000 pada tiap proyek yang dijalankan melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan seperti kamp pelatihan, sesi konseling, dan berbagai layanan lainnya untuk memberikan fasilitas penetrasi pasar yang menyasar beberapa sector vital<sup>72</sup>

Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan “*Women Empowerment Initiative Within the Saudi Annual Budget*” yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Kerajaan Arab Saudi, program *technology pioneers* edisi kedua tersebut telah berhasil menghimpun ide-

---

<sup>71</sup> Ministry of Finance, “Women’s Empowerment Initiative Within the Saudi Annual Budget.”

<sup>72</sup> Saudi Gazette, “MCIT Launches Second Edition of Technology Pioneers Program,” March 15, 2021, <https://saudigazette.com.sa/article/604418>.

ide segar dari 1.806 perempuan, dan 40% dari wirausahawan yang berpartisipasi dalam program tersebut adalah kaum perempuan.<sup>73</sup>

## **5. Pemberdayaan Perempuan Dalam Aspek Peradilan dan Militer**

Sistem peradilan Arab Saudi telah memberikan angin segar bagi para perempuan untuk dapat terlibat dalam setiap proses peradilan yang ada. Di bawah komando kerajaan, Kementerian Kehakiman Arab Saudi telah meluncurkan beberapa inisiasi dalam intensi meningkatkan partisipasi perempuan dalam sistem peradilan seperti menyediakan posisi pegawai kementerian kehakiman bagi para perempuan, kemudian mengizinkan lebih banyak pengacara perempuan untuk mendapatkan lisensi pengacara.<sup>74</sup>

Hingga September 2023, sebanyak 3.844 pengacara perempuan telah mendapatkan lisensi yang memungkinkan mereka untuk praktik dalam proses peradilan, jumlah ini meningkat sekitar 315% dalam kurun waktu 7 tahun terakhir.<sup>75</sup> Jumlah pekerja perempuan di Kementerian Kehakiman Arab Saudi juga mengalami peningkatan yang signifikan, hingga Agustus 2022, Kementerian telah mempekerjakan sekitar 3.538 perempuan dan lebih dari 110 diantaranya telah mencapai posisi

---

<sup>73</sup> Ministry of Finance, “Women’s Empowerment Initiative Within the Saudi Annual Budget.”

<sup>74</sup> Saudi Gazette, “Saudi Women Start to Take over Jobs at Justice Ministry,” December 9, 2018, <https://saudigazette.com.sa/article/549842>.

<sup>75</sup> Arab News, “Saudi Ministry of Justice: 315% Increase in Licenses Granted to Lawyers,” September 14, 2023, <https://www.arabnews.com/node/2373251/saudi-arabia>.

supervisor.<sup>76</sup> Kementerian juga telah menunjuk 100 perempuan yang yang memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan pelatihan dan diberikan lisensi notaris kepada mereka untuk dapat melakukan praktik kenotariatan.<sup>77</sup>

Selain itu, beberapa keputusan hukum telah diambil oleh kementerian kehukuman Arab Saudi demi meningkatkan hak- hak yang harusnya didapat oleh kaum perempuan seperti:

No.	Bunyi Keputusan
1.	Telah dibentuk program dana tunjangan yang bertujuan untuk menyediakan nafkah bagi ibu dan anak-anaknya selama litigasi.
2.	Kementerian Kehakiman telah mempekerjakan perempuan di enam bidang di kementerian tersebut.
3.	Kementerian Kehakiman memberikan izin notaris swasta kepada perempuan.
4.	Pengacara perempuan berlisensi meningkat 120%, dengan total 244 pengacara.
5.	Kementerian Kehakiman telah meluncurkan diploma praktik hukum yang membuat perempuan memenuhi syarat untuk praktik hukum.
6.	Kementerian Kehakiman telah mendirikan pusat-pusat

<sup>76</sup> Ministry of Finance, “Women’s Empowerment Initiative Within the Saudi Annual Budget.”

<sup>77</sup> Saudi Gazette, “100 New Women Notaries to Join Duty on Nov. 1,” accessed March 24, 2024, <https://saudigazette.com.sa/article/599553>.

	khusus untuk melaksanakan keputusan hak asuh anak di luar pusat kepolisian.
7.	Kementerian Kehakiman mewajibkan petugas pencatatan perkawinan untuk mendengar persetujuan perempuan secara lisan.
8.	Kementerian Kehakiman telah menerapkan sistem sidik jari di fasilitas peradilan untuk mempercepat prosedur.
9.	Kementerian Kehakiman telah mendirikan kantor konsiliasi di pengadilan untuk menyelesaikan beberapa masalah keluarga.
10.	Nafkah seorang wanita diprioritaskan di atas hutang-hutang laki-laki yang lain.
11.	Ibu mempunyai hak perwalian atas anak-anak yang berada dalam pengasuhannya.
12.	Kementerian Kehakiman telah menyelenggarakan pameran budaya hukum untuk meningkatkan kesadaran perempuan akan hak-hak mereka.
13.	Keluarga orang yang hilang tidak berhak atas pensiun asuransi sosial.
14.	Hak asuh dan kunjungan anak dilaksanakan di negara yang tercantum dalam instrumen penegakan hukum.
15.	Keputusan hak asuh dan kunjungan anak harus

	dilaksanakan secepatnya.
16.	Kementerian Kehakiman telah mendirikan kantor khusus di pengadilan status pribadi yang melayani perempuan secara gratis.
17.	Perempuan berhak mendapatkan hak asuh atas anak-anaknya tanpa proses pengadilan.
18.	Pernikahan perempuan dapat disahkan di luar jam kerja resmi dalam kasus-kasus khusus. <sup>78</sup>

Kerajaan juga telah mengupayakan pemberdayaan perempuan dalam bidang keamanan dan militer, mereka telah diberikan kesempatan yang sama seperti laki laki untuk dapat berpartisipasi dalam tugas- tugas keamanan kerajaan, termasuk untuk menjadi pasukan khusus yang menjaga 2 masjid suci di kerajaan Arab Saudi.<sup>79</sup> Kementerian Pertahanan telah memperluas cakupan militer untuk para perempuan dengan mengizinkan mereka untuk berpartisipasi dalam tugas tugas kemiliteran. Kaum perempuan saat ini telah diizinkan untuk mendaftar pada berbagai cabang militer kerajaan seperti Angkatan darat, Laut, Udara, dan Pelayanan medis tantara. Adapun Angkatan pertama tentara perempuan

<sup>78</sup> Ministry of Justice, “Sustainable Development Goals,” accessed March 24, 2024, <https://www.moj.gov.sa/English/Ministry/SustainableDevelopment/Pages/SustainableDevelopmentGoals.aspx>.

<sup>79</sup> Deema Al-Khudair, “‘An Honor and Duty:’ Meet the Female Saudi Officers Guarding the Prophet’s Mosque in Madinah,” April 28, 2021, <https://www.arabnews.com/node/1850621/saudi-arabia>.

Arab Saudi berhasil menyelesaikan Pendidikan mereka selama 14 minggu pada September 2021.<sup>80</sup>

## **B. Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 5 Sebagai Norma Internasional**

Florini menyebutkan bahwa norma internasional dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang didalamnya berisikan negara-negara yang mengambil *role* dalam menjalankan aturan-aturan yang telah disepakati.<sup>81</sup> Dengan mengacu pada kerangka berpikir Florini, SDGs disebut sebagai norma internasional karena SDGs merupakan seperangkat tujuan yang disepakati secara internasional yang mengatur upaya-upaya dunia internasional untuk mencapai ke-17 total tujuan SDGs. Implementasi SDGs Nomor 5 sebagai norma internasional oleh Kerajaan Arab Saudi dapat dilihat melalui serangkaian tahapan—termasuk munculnya norma (*emergence of norms*), pembentukan norma (*norm cascade*), dan internalisasi.<sup>82</sup>

Dengan meminjam logika berpikir Florini yang sebelumnya telah mendefinisikan norma internasional, penulis kemudian mencoba menguraikan beberapa alasan mengapa SDGs dianggap sebagai norma internasional; 1) SDGs dalam ini disepakati oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 silam; 2) SDGs menuntut tanggung jawab bersama pada setiap negara-negara untuk

---

<sup>80</sup> Ahmad Fauzi Iyabu, "Print History, Saudi Arabia Approves The First Forces Of The Women's Army," accessed March 24, 2024, <https://voi.id/en/news/81596>.

<sup>81</sup> Florini, "The Evolution of International Norms."

<sup>82</sup> Finnemore and Sikkink, "International Norm Dynamics and Political Change."

mencapai tujuan-tujuan yang tertuang dalam ke-17 poin SDGs; 3) SDGs disusun dan didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat universal—yang mencakup keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia; 4) Implementasi SDGs dalam ini memerlukan serangkaian bentuk kolaborasi atau kerja sama internasional yang erat antar negara anggota, organisasi internasional, dan lain sebagainya.,

SDGs sejatinya berlaku secara umum sebagai norma internasional karena isi daripada SDGs ini merupakan komitmen bersama dalam mencapai tujuan-tujuan yang sebelumnya telah dicanangkan. Selanjutnya, dengan meminjam logika berpikir Finnemore dan Sikkink yang sebelumnya telah menerangkan adanya tahapan pembentukan norma internasional, berikut akan dipaparkan 3 tahapan siklus bagaimana Arab Saudi mengadopsi SDGs Nomor 5 sebagai norma internasional;

*Pertama*, munculnya norma sebagai tatanan baru di Arab Saudi terbagi menjadi dua hal; 1) Kerajaan Arab Saudi melakukan reformasi kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip SDGs—termasuk pemberdayaan perempuan sesuai dengan SDG nomor 5. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan ke pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik; 2) Munculnya norma-norma baru terkait dengan SDGs dan pemberdayaan perempuan juga dapat dipengaruhi oleh tekanan internasional—termasuk dari masyarakat internasional dan organisasi internasional yang mendorong implementasi SDGs di Arab Saudi.

*Kedua*, pembentukan norma di Arab Saudi dilakukan dengan menempuh dua hal; 1) Kerajaan Arab Saudi mulai mengadopsi kebijakan yang konsisten dengan tujuan SDGs seperti kebijakan untuk mengurangi kesenjangan gender, meningkatkan akses perempuan ke pekerjaan dan pendidikan, serta mempromosikan kesetaraan gender dalam kehidupan politik; 2) Saudi Arabia mulai terbuka untuk aktif berpartisipasi dalam forum-forum internasional yang membahas SDGs—termasuk memberikan kontribusi dalam diskusi dan berbagi praktik terbaik dengan negara-negara lain perihal pemberdayaan wanita.

*Ketiga*, proses internalisasi oleh Kerajaan Arab Saudi ditempuh dengan beberapa hal; 1) Arab Saudi menggunakan pendidikan dan kampanye penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemberdayaan perempuan dan bagaimana SDGs dapat menjadi kerangka kerja untuk mencapai tujuan tersebut; 2) Arab Saudi mulai mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan SDGs untuk dapat membantu memperkuat norma-norma pemberdayaan perempuan dalam masyarakat Saudi—termasuk dalam mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan ekonomi, politik, dan sosial.

Menurut hemat penulis, melalui ketiga tahap inilah implementasi SDGs sebagai norma internasional dapat menjadi bagian integral dari upaya mencapai Visi Saudi 2030. Hal ini akan memungkinkan Arab Saudi untuk memperkuat komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan

dan pemberdayaan perempuan. Tidak hanya itu, hal ini akan menjadikan Arab Saudi menjadi suatu negara yang turut berkontribusi pada tujuan internasional yang lebih luas untuk menciptakan dunia yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

### **C. Implementasi SDGs Nomor 5 Oleh Kerajaan Arab Saudi**

Kerajaan Arab Saudi telah menunjukkan komitmen yang baik dalam pemberdayaan perempuan melalui implementasi SDGs no.5 sebagai kerangka kerja global yang menjadi acuan entitas negara dalam melaksanakan kesetaraan gender. Berdasarkan resolusi PBB No.70/1, terdapat 9 target yang mendukung perwujudan kesetaraan gender melalui SDGs nomor 5, yakni :

- a) Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dimanapun
- b) Menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di ruang pribadi dan publik, termasuk perdagangan manusia, eksploitasi seksual dan segala bentuk eksploitasi
- c) Menghilangkan segala praktik kejahatan, seperti pernikahan dini dan pernikahan paksa, serta praktik sunat terhadap kaum perempuan
- d) Mengakui dan menghargai pekerjaan mengasuh dan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan public, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, serta peningkatan

tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional

- e) Menjamin partisipasi penuh dan efektif, serta kesempatan yang setara untuk kepemimpinan di setiap level dari pembuatan keputusan dalam kehidupan Politik, ekonomi, dan public.
- f) Menjamin akses yang universal terhadap Kesehatan seksual dan reproduksi, serta hak untuk reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platforms* serta dokumen- dokumen hasil revidi dari konferensi tersebut.
- g) Melakukan reformasi untuk memberikan hak yang setara kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan control atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.
- h) Meningkatkan penggunaan teknologi yang mumpuni, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan

- i) Mengadopsi dan memperkuat kebijakan dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan dalam setiap level.<sup>83</sup>

Berdasarkan 9 Target SDGs no.5 diatas, Kerajaan Arab Saudi telah melaksanakan implementasi dari setiap target yang ada, berikut ini adalah rincian mengenai pelaksanaan tiap- tiap poin yang terkandung di dalam SDGs nomor 5 oleh Kerajaan Arab Saudi:

### **1. Implementasi Poin 5.1**

Poin 5.1 memiliki intensi untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi pada perempuan dimanapun. Upaya demi mewujudkan target 5.1 ini telah diupayakan oleh pemerintah Arab Saudi khususnya dalam bentuk payung hukum yang dapat menjadi fondasi demi terwujudnya dari target tersebut. Adapun payung hukum yang dimaksud dapat berupa dekrit kerajaan, maupun amandemen dari Undang- undang yang telah ada sebelumnya.

Dekret kerajaan No M/52 menjadi payung hukum nyata dalam pemenuhan target 5.1 ini, Adapun dekrit ini telah dianggap menjadi kerangka nasional yang ditujukan untuk menangani segala bentuk diskriminasi yang dihadapi oleh seorang individu maupun dalam kelompok masyarakat tertentu.<sup>84</sup> Dekrit ini juga memiliki intensi untuk menyediakan perlindungan dari segala bentuk pelecehan, menyediakan

---

<sup>83</sup> Department of Economic and Social Affairs, "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development."

<sup>84</sup> Arab Digital Inclusion Platform, "Saudi Arabia Law on Protection from Abuse," 2013, <https://e-inclusion.unescwa.org/index.php/resources/1064>.

pengobatan secara psikologi, mental, dan medis kepada korban, serta mengambil Tindakan hukum yang diperlukan untuk meminta pertanggungjawaban dan menghukum pelaku pelecehan, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai konsep pelecehan dan konsekuensinya.

## **2. Implementasi Poin 5.2**

Dalam pemenuhan target 5.2, Kerajaan Arab Saudi telah mengupayakan cara-cara terutama dalam hal fundamental yakni perundang-undangan. Dekrit Kerajaan No. M/96 telah disahkan pada Mei 2018 tentang yang mengamandemen UU anti – pelecehan yang telah ada sebelumnya.<sup>85</sup> Undang-undang tersebut bertujuan untuk memberantas kejahatan pelecehan dan mencegah terjadinya kejahatan tersebut, dengan memberikan sanksi kepada pelakunya dan melindungi korbannya, sehingga menjaga privasi, martabat dan kebebasan pribadi seseorang, sebagaimana dijamin oleh ketentuan Syariat Islam dan undang-undang lainnya.

Pada tahun 2022, Pengadilan Arab Saudi berhasil menjatuhkan hukuman untuk pertama kalinya kepada Pelaku pelecehan setelah UU anti pelecehan dikeluarkan pada 2018. Pelaku tersebut ialah Yasser Al-Arawi, yang terbukti bersalah melecehkan seorang perempuan melalui

---

<sup>85</sup> Riyadh Bureau, “Saudi Arabia Amends Anti- Harassment Law.”

komentar yang tidak senonoh, Adapun ia mendapatkan hukuman 8 bulan penjara dan dikenai denda sebesar \$1.330.<sup>86</sup>

Dalam kasus lain, seorang dokter berkewarganegaraan Syria terbukti melakukan pelecehan secara seksual kepada seorang perawat berkewarganegaraan Filipina. Pelaku awalnya dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan dikenai denda sebesar SAR 5000 oleh pengadilan criminal provinsi Asir, namun dokter Syria tersebut merasa keberatan atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya dan mengajukan banding dengan intensi agar ia dapat dibebaskan, namun jaksa penuntut umum yang menangani kasus ini berpikir sebaliknya dan Pengadilan Banding menghasilkan kesimpulan bahwa hukuman yang dijatuhkan pada putusan pengadilan pertama terlalu ringan, oleh karena itu diputuskan bahwa dokter berkewarganegaraan Syria tersebut dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun<sup>87</sup>, yang mana merupakan hukuman maksimal bagi pelaku pelecehan seksual sesuai pasal 6 Dekrit kerajaan no M/96.<sup>88</sup>

Amandemen terhadap UU anti pelecehan ini dinilai sudah cukup memberikan perubahan positif pada perlindungan perempuan. Banyak juga harapan bahwa dnegan UU tersebut memberikan proteksi

---

<sup>86</sup> BBC, "Saudi Court Orders First Naming of Man Guilty of Sexual Harassment," January 12, 2022, <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-59956826>.

<sup>87</sup> Okaz, "5 Years in Jail for Syrian Doctor Who Sexually Harassed Filipino Nurse," October 1, 2023, <https://www.saudigazette.com.sa/article/636368/SAUDI-ARABIA/5-year-jail-for-Syrian-doctor-for-sexually-harassing-Filipino-nurse-in-Asir>.

<sup>88</sup> "Anti- Harassment Law" (Bureau of Experts at The Council of Ministers), accessed March 19, 2024, <https://laws.boe.gov.sa/Files/Download/?attId=20d22961-edd8-48e4-8ad3-adbb010dcadb>.

dan memperkuat posisi perempuan dalam lingkungan kerja, serta harapan akan peningkatan jumlah pekerja perempuan di Kerajaan Arab Saudi.

### **3. Implementasi Poin 5.3**

Kerajaan Arab Saudi telah berkomitmen untuk menghilangkan pernikahan dini yang kerap terjadi kepada perempuan usia dini di Arab Saudi, hal ini sejalan dengan target yang tertuang dalam poin 5.3. Adapun komitmen tersebut ditunjukkan melalui amandemen UU Perlindungan anak oleh Dewan Syura pada Januari 2019. Amandemen ini telah melarang pernikahan bagi anak-anak dibawah 15 tahun sepenuhnya, dan memberikan syarat-syarat khusus bagi pernikahan anak dengan umur 16-18 tahun<sup>89</sup>

Berdasarkan data sensus 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Statistik Arab Saudi, jumlah perempuan (rentang umur 15-19 tahun ) yang menikah sebanyak 53.727 individu, kemudian 1.386 individu diantaranya mengalami perceraian, dan 179 individu menjadi janda diakibatkan kematian suaminya.<sup>90</sup> seperti yang terlihat pada tabel 2 berikut:

---

<sup>89</sup> The National, "Saudi Arabia Moves to Ban Child Marriage with a New Ruling," 2019, <https://www.thenationalnews.com/world/gcc/saudi-arabia-moves-to-ban-child-marriage-with-a-new-ruling-1.955310>.

<sup>90</sup> General Authority for Statistics, "Census 2010," accessed February 15, 2024, [https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/en-census2010-dtl-result\\_2\\_1.pdf](https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/en-census2010-dtl-result_2_1.pdf).

Tabel 2. Status Pernikahan Individu Umur 15-19 Tahun di Arab Saudi Tahun 2010 Berdasarkan Gender

	<b>Perempuan</b>	<b>Laki-Laki</b>
<b>Menikah</b>	53727	17927
<b>Bercerai</b>	1386	473
<b>Janda/duda</b>	179	76

Sumber: Census 2010, Badan Statistik Kerajaan Arab Saudi, di tabulasikan oleh peneliti.

Kemudian berdasarkan data terbaru yang diperoleh dari Badan statistik Kerajaan Arab Saudi dalam Laporan “*Saudi Women’s Report*” yang dipublikasi pada tahun 2022, masih banyak ditemukan pernikahan anak usia dini (rentang umur 15-19 tahun), yakni sebanyak 40.348 individu yang menikah, kemudian 2436 individu telah mengalami perceraian, serta 415 individu telah menjadi janda.<sup>91</sup> seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Status Pernikahan Perempuan Umur 15-19 Tahun di Arab Saudi tahun 2022

<b>Status</b>	<b>Jumlah Populasi</b>
<b>Menikah</b>	40348
<b>Bercerai</b>	2436
<b>Janda</b>	415

Sumber: Saudi Women's Report 2022, Badan Statistik Kerajaan Arab Saudi.

Jika dilakukan perbandingan diantara dua data yang diperoleh pada waktu 2010 dan data yang diperoleh pada tahun 2022, ditemukan penurunan angka pernikahan, perceraian, dan janda pada perempuan

<sup>91</sup> General Authority for Statistics, “Saudi Women’s Report 2022.”

dengan usia dini (15-19 tahun) di Arab Saudi. Meski begitu angka yang terbaru masih menunjukkan tingginya tingkat pernikahan, perceraian, dan janda pada perempuan dengan usia dini di Arab Saudi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya menjadi fokus penilaian Kembali oleh kerajaan atas program- program yang sudah ditujukan demi mengurangi angka ini, juga diperlukan sebuah kajian atas akar hambatan dari angka yang masih cukup tinggi ini, hingga hambatan-hambatan yang terjadi dapat diselesaikan dan angka tersebut dapat ditekan.

Peneliti belum dapat menemukan data terkait jumlah dari perempuan Arab Saudi yang terdampak oleh praktik mutilasi alat genital (Sunat). Praktik ini menjadi hal yang lazim dan sensitif untuk dibicarakan di Arab Saudi, karena praktik ini dianggap sakral secara agama islam dan telah menjadi budaya masyarakat.<sup>92</sup> Meski negara-negara barat telah melarang praktik ini, Kerajaan Arab Saudi masih bungkam dan masih mengabsenkan hukum yang melarang sunat perempuan ini.

#### **4. Implementasi Poin 5.4**

Kerajaan Arab Saudi telah mengakui pekerjaan rumah tangga yang mana utamanya dipelopori oleh perempuan sebagai aspek penting dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu beberapa aspek

---

<sup>92</sup> Maha Akeel, "Female Circumcision: Weight Of Tradition Perpetuates A Dangerous Practice," accessed May 12, 2024, [https://www.arabnews.com/node/263988?\\_cf\\_chl\\_tk=NaNLZbjk\\_dNBgk9VQ5n7fpmF.CnFKI8tc.CxOU3fnOw-1717942894-0.0.1.1-4756](https://www.arabnews.com/node/263988?_cf_chl_tk=NaNLZbjk_dNBgk9VQ5n7fpmF.CnFKI8tc.CxOU3fnOw-1717942894-0.0.1.1-4756).

telah diupayakan kerajaan seperti penjaminan kebebasan dan keamanan perempuan untuk bepergian tanpa izin dari mahramnya, kemudian diperbolehkannya perempuan untuk menyetir mobil sendiri. Adapun diperbolehkannya perempuan untuk menyetir sendiri ini tertuang dalam Royal Decree No. M/85, yang dikeluarkan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud kepada Menteri Dalam Negeri Saudi Arabia pada 27 September 2017 dan mulai berlaku pada 24 Juni 2018.<sup>93</sup> Sejak tanggal diberlakukannya hingga Januari 2020, Pemerintah Arab Saudi telah menerbitkan setidaknya 174 ribu izin mengemudi dan 84.8% dari jumlah tersebut merupakan izin mengemudi yang diterbitkan untuk perempuan.<sup>94</sup>

Dengan diizinkannya perempuan untuk menyetir mobil sendiri telah berdampak besar pada roda kehidupan sehari-hari kehidupan keluarga, para perempuan saat ini telah mampu melakukan pekerjaan rumah tangga seperti membeli kebutuhan pangan, mengantarkan anaknya ke sekolah, ataupun untuk keperluan rumah tangga lainnya, dan bahkan untuk keperluan pribadinya.

## 5. Implementasi Poin 5.5

Arab Saudi telah melaksanakan beberapa upaya dalam pemenuhan target 5.5, salah satunya melalui peluncuran program Qiyadyat (*Female Leadership Program*) yang didirikan oleh Yayasan

---

<sup>93</sup> The Embassy of The Kingdom of Saudi Arabia, “King Salman Issues Royal Decree: Women Will Drive in Saudi Arabia.”

<sup>94</sup> “Saudi Women: The Partner of Success (International Women’s Day)” (General Authority for Statistics, 2020), [https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/woman\\_international\\_day\\_2020.pdf](https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/woman_international_day_2020.pdf).

Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Misk. Program tersebut memiliki intensi utama untuk menemukan para pemimpin muda perempuan, mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka, dan membekali para pemimpin muda perempuan dengan pengalaman praktik terbaik agar memastikan masa depan yang lebih baik bagi kerajaan Arab Saudi.

Kerajaan Arab Saudi juga memberikan komitmen nyata pada pemenuhan target 5.5 ini dengan cara mengalokasikan 20% kursi dari Dewan Syura atau Majelis Permusyawaratan Arab Saudi.<sup>95</sup> Bahkan dalam periode saat ini, salah satu perempuan berhasil menduduki posisi tinggi yakni, Dr. Hanan Al- Ahmadi yang menjadi Asisten Ketua Dewan Syura.<sup>96</sup>

Selain itu, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh UN Women, 6.8 % perempuan Arab Saudi yang telah menduduki posisi kepemimpinan atau dalam tingkat manajerial.<sup>97</sup> Beberapa perempuan Arab Saudi yang menduduki beberapa posisi penting dalam kancah internasional antara lain: Basmah Al- Mayman, yang menjadi Direktur Regional Timur Tengah di *United Nations World Tourism*

---

<sup>95</sup> Middle East Policy Council, "Saudi Women Gain Representation on the Shura Council," accessed March 2, 2024, <https://mepc.org/commentary/saudi-women-gain-representation-shura-council>.

<sup>96</sup> The Shura Council, "Member CV'S," accessed March 2, 2024, <https://www.shura.gov.sa/wps/wcm/connect/shuraen/internet/cv>.

<sup>97</sup> UN Women, "Women Count : Saudi Arabia," accessed March 2, 2024, <https://data.unwomen.org/country/saudi-arabia>.

*Organization (UNWTO)*<sup>98</sup>. Kemudian HRH Putri Haifa Al-Muqrin, yang menjadi Perwakilan Permanen dari Arab Saudi kepada *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)*<sup>99</sup>, Lubna Al-Olayan yang menjadi Ketua dari *Saudi British Bank (SABB)* sejak 2019 hingga saat ini, Kemudian Rania Nashar yang menjadi CEO dari *Samba Financial Group* dan ia juga masuk dalam daftar “*The World’s 100 Most Powerful Women*” yang dikeluarkan oleh majalah Forbes<sup>100</sup>, kemudian HRH Putri Reema Bint Bandar, yang menjadi perempuan Saudi pertama sebagai duta besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat<sup>101</sup>, dan Sarah Al- Suhaimi menduduki posisi ketua dari Tadawul yang merupakan Bursa Efek Arab Saudi dan menjadi yang terbesar di Kawasan Timur Tengah.<sup>102</sup>

Upaya- upaya yang telah dilakukan Kerajaan Arab Saudi telah menunjukkan kemajuan yang sangat progresif, tentu dalam pemenuhan target 5.5 dibutuhkan nilai- nilai dari *good governance*, sikap keterbukaan dari kerajaan untuk membawa para perempuan menuju

---

<sup>98</sup> Tax Free World Association, “Basmah Al-Mayman - The MEADFA Conference,” accessed March 2, 2024, <https://www.tfw.com/the-meadfa-conference/basmah-al-mayman-100011992>.

<sup>99</sup> Asharq Al Awsat, “Haifa Al-Muqrin Becomes KSA’s Permanent Representative to UNESCO,” accessed March 2, 2024, <https://english.aawsat.com/home/article/2084236/haifa-al-muqrin-becomes-ksa%E2%80%99s-permanent-representative-unesco>.

<sup>100</sup> Forbes, “The World’s 100 Most Powerful Women List,” accessed March 2, 2024, <https://www.forbes.com/power-women/list/>.

<sup>101</sup> Saudi-US Trade Group, “Saudi Arabia Names New Ambassador to United States: Princess Reema Bint Bandar,” accessed March 2, 2024, <https://www.sustg.com/saudi-arabia-names-new-ambassador-to-united-states-princess-reema-bint-bandar/>.

<sup>102</sup> Forbes, “Sarah Al-Suhaimi - Most Powerful Businesswomen 2024 - Forbes Lists,” accessed March 2, 2024, <https://www.forbesmiddleeast.com/lists/100-most-powerful-businesswomen-2024/sarah-al-suhaimi/>.

tahap kepemimpinan yang memiliki segenap kepercayaan diri atas kemampuan dirinya dalam sebuah proses pengambilan keputusan. Kerajaan juga telah membawa para perempuan Arab Saudi kedalam perlindungan akan sikap diskriminasi dan penindasan dalam tingkat pengambilan keputusan atau dalam proses politik yang sebelumnya marak terjadi.

#### **6. Implementasi Poin 5.6**

Undang – undang Kerajaan Arab Saudi telah mengakui dan memberi komitmen bahwa telah menjadi hak bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan yang setara, hal ini tertuang dalam pasal 27 Royal Decree No A/90 yang berbunyi:

*“The State shall guarantee the rights of the citizens and their families in cases of emergency, illness, disability and old age. The State shall support the Social Insurance Law and encourage organizations and individuals to participate in philanthropic activities”*.<sup>103</sup>

Melalui dekrit kerajaan tersebut dapat dipahami bahwa Arab Saudi mengakui secara penuh bahwa akses ke layanan Kesehatan dalam setiap aspek, bahkan dalam aspek seksual dan reproduksi merupakan hak- hak dasar yang melekat pada setiap individu baik itu laki- laki maupun perempuan. Dengan ini, seluruh peraturan dan prosedur Kesehatan yang telah ada di kerajaan Arab Saudi juga menjamin hak

---

<sup>103</sup> The Embassy of The Kingdom of Saudi Arabia, “Basic Law of Governance,” accessed March 2, 2024, <https://www.saudiembassy.net/basic-law-governance>.

perempuan untuk mendapatkan layanan Kesehatan tanpa ada pengecualian yang membatasi seorang perempuan untuk menggunakan hak ini.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Statistik Arab Saudi melalui laporan “*Saudi Women The Partner of Success : International Women’s Day 2022*” tingkat kesuburan perempuan Arab Saudi berada pada peringkat 7 dari 20 negara G-20 seperti yang terlihat pada diagram 1 berikut:

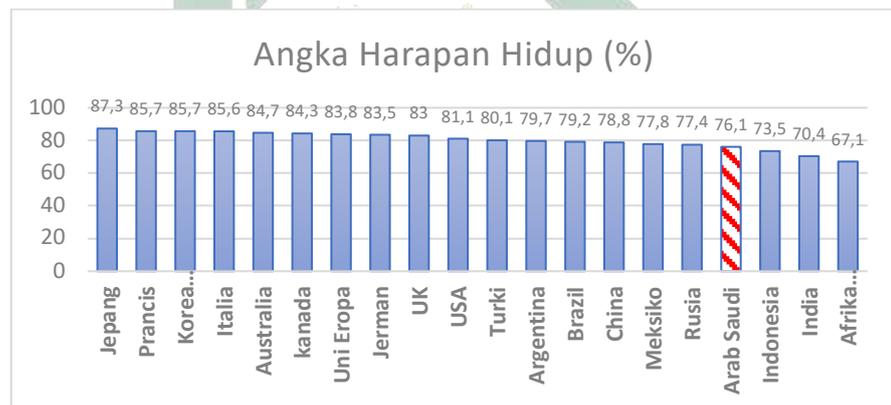


Diagram 1. Angka Harapan Hidup Perempuan di Negara Anggota G-20 Sumber : General Authority for Statistics, “*Saudi Women The Partner of Success: International Women’s Day*”

Kemudian dalam laporan yang sama, ditemukan bahwa angka harapan hidup bagi perempuan Arab Saudi berada di peringkat 16 dari 20 negara G-20.<sup>104</sup> seperti yang terlihat pada diagram 2 berikut:

<sup>104</sup> General Authority for Statistics, “*Saudi Women The Partner of Success: International Women’s Day*,” accessed March 2, 2024, [https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/woman\\_international\\_day\\_2020EN.pdf](https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/woman_international_day_2020EN.pdf).



Diagram 2. Tingkat Kesuburan Perempuan di Negara Anggota G-20 (Dalam Persen), Sumber: General Authority for Statistics, “Saudi Women The Partner of Success: International Women’s Day”

Kemudian Badan Statistik Arab Saudi dalam " Women Health and Reproductive Care Statistics Publication" tahun 2023 menyatakan bahwa 99.69% Ibu hamil mengunjungi fasilitas Kesehatan setidaknya sekali sebelum dilakukan persalinan, kemudian sebanyak 89.41% ibu hamil mengunjungi fasilitas kesehatan setidaknya 4 kali sebelum dilakukan melakukan persalinan seperti yang terlihat pada diagram 3 berikut:

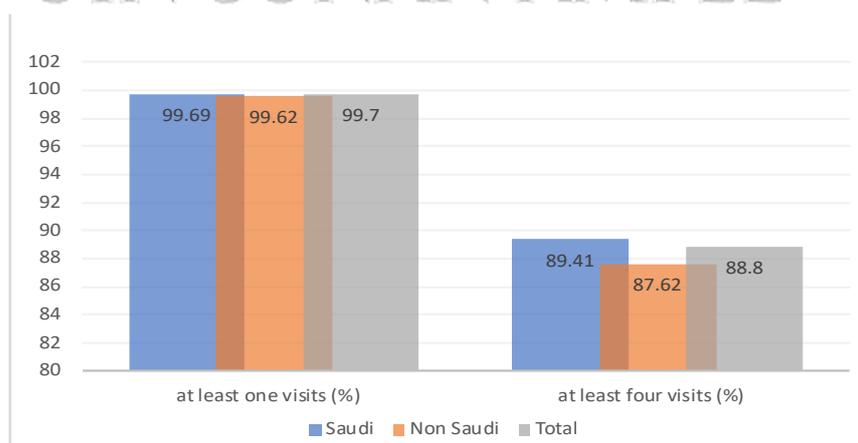


Diagram 3, Presentase ibu hamil di Arab Saudi yang mengunjungi fasilitas Kesehatan sebelum melahirkan. Sumber: General Authority for Statistics, “Women Health and Reproductive Care Statistics Publication 2023.

Kemudian dalam laporan yang sama, Badan Statistik Kerajaan Arab Saudi menyatakan bahwa 40% dari perempuan Arab Saudi yang telah menikah telah menggunakan perencanaan keluarga (Kontrasepsi).<sup>105</sup> seperti yang terlihat pada grafik 2 berikut:

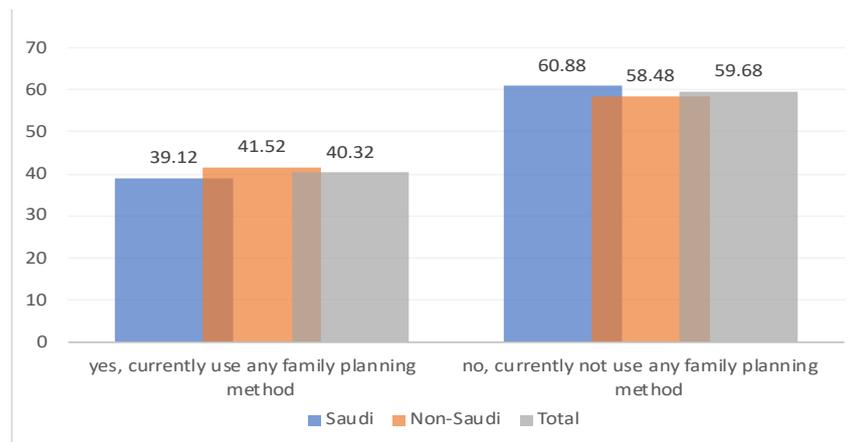


Diagram 4, Presentase perempuan Arab Saudi yang telah menikah dan menjalankan program perencanaan keluarga (Kontrasepsi). Sumber: General Authority for Statistics, “Women Health and Reproductive Care Statistics Publication 2023.

Berdasarkan data yang dilampirkan, kerajaan Arab Saudi telah mengalami perkembangan yang progresif bagi pemenuhan target 5.6 SDGs. Kerajaan berhasil menyediakan payung hukum sebagai fondasi pemenuhan target 5.6 SDGs, kemudian program-program yang dilaksanakan seperti menghadirkan perempuan yang hamil ke fasilitas kesehatan telah teraplikasi setidaknya kepada 99.69% perempuan Saudi yang sedang hamil per 2023. Kemudian program

<sup>105</sup> General Authority for Statistics, “Women Health and Reproductive Care Statistics Publication 2023,” 2023, [https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/Women\\_Health\\_and\\_Reproductive\\_Care\\_Statistics\\_Publication\\_2023\\_EN.pdf](https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/Women_Health_and_Reproductive_Care_Statistics_Publication_2023_EN.pdf).

perencanaan keluarga (Kontrasepsi) menunjukkan angka yang cukup besar yakni di 40% per 2023. mengingat dahulu Arab Saudi merupakan negara yang sangat menolak kontrasepsi ini sebagai impilkasi dari Hukum Syariah yang menjadi dasar negaranya.

## 7. Implementasi Poin 5.a

Hukum syariah di Arab Saudi ditafsirkan dan diterapkan kepada setiap individu baik laki- laki maupun perempuan, dan dilaksanakan berdasarkan penilaian dari Dewan Ulama Senior yang mempunyai kekuasaan dalam pengambilan keputusan dan penetapan akan hukum yang berlaku di masyarakat. Menurut Halperin dan Freeman, perempuan Arab Saudi yang telah menikah maupun belum menikah memiliki hak hukum untuk memiliki tanah dan asset non tanah.<sup>106</sup> Bahkan setelah perempuan menikah, ia juga berhak atas kepemilikan dan control atas setiap property yang ia miliki dengan suaminya.

Dalam intensi menaikkan tingkat kepemilikan rumah bagi masyarakatnya menjadi 60% per 2020, dan 70% per 2030, Kerajaan Arab Saudi telah memberikan bantuan kepada lebih dari 73.000 perempuan Saudi dalam bentuk pinjaman hipotek melalui *Real Estate Development Fund (REDF)*.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Ruth Halperin-Kaddari and Marsha Freeman, "Economic Consequences of Marriage and Its Dissolution: Applying a Universal Equality Norm in a Fragmented Universe," 2017, [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2992606](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2992606).

<sup>107</sup> Arab News, "Saudi Fund Helps More than 73,000 Women to Own Homes," December 7, 2020, <https://www.arabnews.com/node/1773461/saudi-arabia>.

Peneliti tidak dapat menemukan tingkat presentase dan jumlah pasti dari kepemilikan atas tanah/ rumah dari perempuan di Arab Saudi baik dari publikasi resmi kerajaan seperti badan statistic Arab Saudi sendiri maupun dari pihak eksternal, meski begitu Kerajaan telah memberikan komitmen nyata dengan membantu lebih dari 73 ribu perempuan untuk memiliki rumah pertama yang dapat mereka huni sendiri.

Kemudian dalam konteks kepemilikan lahan pertanian yang produktif di Arab Saudi, data yang diperoleh dari Badan Statistik melalui laporan “*Sustainable Development Goals( SDGs) in KSA (Status Quo Statistical Report) Tahun 2018*” ditemukan bahwa, presentase perempuan hanya 0.31% dan laki- laki berada di 20.81%.<sup>108</sup> Seperti yang terlihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4, Presentase kepemilikan lahan pertanian. Sumber: Sustainable Development Goals( SDGs) in KSA

Indicator	Gender	2014
Proportioin of agricurtural population owning agricultural land	male	20.81
	female	0.31

Sumber: Badan Statistik Arab Saudi. *Sustainable Development Goals( SDGs) in KSA: Status Quo Statistical Report*.

Perbedaan yang sangat signifikan seperti yang ditunjukkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa masih lemahnya usaha kerajaan dalam pemenuhan salah satu indicator target 5.a ini, oleh karena itu diperlukan mekanisme yang lebih menjanjikan dan memberikan

<sup>108</sup> General Authority for Statistics, “Sustainable Development Goals( SDGs) in KSA: Status Quo Statistical Report.”

dorongan kepada para perempuan untuk dapat memiliki lahan pertanian produktif atas kemauan dan Namanya sendiri.

## 8. Implementasi Poin 5.b

Target 5.b SDGs no.5 ialah meningkatkan penggunaan teknologi yang memadai sebagai salah satu cara pemberdayaan perempuan. Salah satu bentuk untuk memenuhi tujuan ini ialah dengan meningkatkan presentase penggunaan *Smartphone* atau ponsel pintar yang disadari dapat meningkatkan kemampuan para perempuan untuk melakukan komunikasi dan mencari berbagai informasi yang ia butuhkan melalui ponsel pintar. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Badan Statistik Kerajaan Arab Saudi, presentase akan kepemilikan ponsel pintar dari perempuan di Arab Saudi pada 2019 mencapai 85.24%<sup>109</sup>, seperti yang tercantum dalam tabel 5 dibawah:

Tabel 5, Presentase individu 15 tahun keatas dan tipe ponsel yang digunakan berdasarkan gender di seluruh kerajaan tahun 2019

Type of cell phone	Saudi		
	Male	Female	Total
Smart cell phone	92	85.24	88.62
Non-smart cell phone	15.53	13.97	14.75

Sumber: Bulletin of Households and Individulas' ICT Access and Usage Survey 2019.

---

<sup>109</sup> General Authority for Statistics, "Bulletin of Households and Individuals' ICT Access and Usage Survey," 2019, [https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/bulletin\\_of\\_households\\_and\\_individuals\\_ict\\_access\\_and\\_usage\\_survey2019\\_new.pdf](https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/bulletin_of_households_and_individuals_ict_access_and_usage_survey2019_new.pdf).

Kemudian dalam publikasi terakhir kerajaan pada 2021, presentase kepemilikan ponsel pintar mengalami peningkatan sebanyak 8.74% menjadi 93.98%<sup>110</sup> seperti yang terlihat pada tabel 6 berikut:

*Tabel 6*, Presentase individu 15 tahun keatas dan tipe ponsel yang digunakan berdasarkan gender di seluruh kerajaan tahun 2021

Type of cell phone	Saudi		
	Male	Female	Total
Smart cell phone	96.45	93.98	95.215
Non-smart cell phone	4.29	6.23	5.26

Sumber: General Authority for Statistics, “Survey of Access & Usage Households & Individuals to ICT 2021

Tren peningkatan presentase pengguna ponsel pintar bagi perempuan di Arab Saudi ini telah memberi dukungan pada mereka baik di daerah metropolitan maupun daerah pinggiran Arab Saudi untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi yang dapat mendukung proses proses pemberdayaan atas kaum perempuan.

## 9. Implementasi Poin 5.c

Pada target 5.c, Kerajaan Arab Saudi disadari telah memenuhi persyaratan dalam bentuk hukum yang menjadi landasan dalam pembentukan kebijakan- kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Adapun bentuk hukum yang dimaksud telah tertuang dalam pembahasan sebelum- sebelumnya seperti munculnya Dekrit Kerajaan No. M/96 yang mengamandemen UU anti – pelecehan yang telah ada sebelumnya, dengan amandemen yang

<sup>110</sup> General Authority for Statistics, “Survey of Access & Usage Households & Individuals to ICT 2021,” 2021, <https://www.stats.gov.sa/en/952>.

dilakukan oleh Kerajaan ini berhasil melindungi para perempuan dengan lebih baik. Kemudian penguatan UU ketenagakerjaan Kerajaan Arab Saudi melalui Dekrit Kerajaan no. M/51 yang terbukti lebih mendorong para perempuan untuk lebih berpartisipasi dalam dunia pekerjaan. Penguatan perlindungan kepada para perempuan yang termaktub dalam UU tersebut telah menaikkan partisipasi dari kaum perempuan untuk menjadi pekerja di Arab Saudi. Kerajaan juga disadari telah melakukan transparansi dalam menunjukkan *progress* implementasi SDGs khususnya no.5 melalui penyediaan berbagai laporan oleh Badan Statistik terkait pemenuhan target- target yang tertuang dalam SDGs no.5 di Kerajaan Arab Saudi.

Melalui penjelasan mengenai implementasi diatas menunjukkan bahwa Kerajaan Arab Saudi telah menunjukkan komitmen yang cukup baik dalam implementasi SDGs nomor 5 sebagai sebuah norma yang telah disepakati secara internasional berdasarkan resolusi PBB no.70/1 untuk mewujudkan kesetaraan gender bagi seluruh perempuan di seluruh dunia.

Mengacu pada usaha Kerajaan Arab Saudi dalam pemberdayaan perempuan dan implementasi SDGs nomor 5 seperti yang telah diuraikan oleh peneliti diatas, maka Kerajaan sejatinya telah berhasil menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam pemberdayaan perempuan. Dalam ini, pencapaian pemberdayaan perempuan yang berhasil direalisasikan oleh Kerajaan Arab sejatinya dapat dipahami melalui indikator yang

digagas oleh seorang peneliti yakni, Naila Kabeer yang telah menyoroti ekspansi kapabilitas dan kemampuan perempuan dalam menentukan keputusan yang bersifat strategis dalam kehidupan perempuan—yang bahkan sebelumnya kaum-kaum perempuan ini tidak pernah dilibatkan karena adanya pembatasan-pembatasan sosial dengan dalih perbedaan *culture*, agama, dan politik.<sup>111</sup>

Dengan meminjam logika berpikir Bareet, Bereet turut mendeskripsikan pemberdayaan sebagai proses peningkatan kapabilitas dan kemampuan. Melalui SDGs nomor 5, Kerajaan Arab Saudi melihat bahwa pemberdayaan perempuan dianggap sebagai peningkatan kemampuan dalam setiap *decision making process* karena perempuan memiliki *power* untuk menentukan pilihan-pilihan atau arah kehidupannya dengan tanpa adanya paksaan.<sup>112</sup> Sebelumnya, Kabeer juga telah menerangkan bahwa orientasi dari pemberdayaan adalah adanya perubahan sosial dalam konteks feminis atau berorientasi pada terjadinya perubahan polarisasi antara relasi dan kuasa sehingga perempuan tidak lagi disebut “*The Sound Class*” yang ditinjau dari empat dimensi. Berikut akan dipaparkan ketiga dimensi pemberdayaan perempuan di Arab Saudi yang berorientasi pada konteks perubahan sosial dengan mengacu kerangka berpikir Kabeer:

---

<sup>111</sup> Ria Susanti et al., “Agency Perempuan Pada Pondok Pesantren Di Kalimantan Selatan,” *Al-Banjari* Vol.20, No.1, Januari-Juni (2021), [https://www.researchgate.net/publication/366556938\\_AGENCY\\_PEREMPUAN\\_PADA\\_PONDO\\_K\\_PESANTREN\\_DI\\_KALIMANTAN\\_SELATAN](https://www.researchgate.net/publication/366556938_AGENCY_PEREMPUAN_PADA_PONDO_K_PESANTREN_DI_KALIMANTAN_SELATAN).

<sup>112</sup> Andrew Bartlett, “Entry Points For Empowerment :A Report For CARE Bangladesh.”

*Pertama*, Kabeer mendefinisikan *agency* sebagai suatu kemampuan dari seseorang perempuan dalam mendefinisikan setiap upaya dan tujuannya dalam bertindak pada proses pengambilan keputusan seperti melakukan *bargaining*, negosiasi, subversi, pun juga resistensi. Tidak hanya itu, Kabeer juga sebelumnya menerangkan bahwa *agency* adalah proses analisis oleh yang tidak terlepas dari *the power within* atau pemahaman dalam melakukan suatu tindakan yang bersifat kolektif. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa agensi ini mengandung dua kekuatan; 1) Agensi dengan kekuatan positif mengacu pada kemampuan perempuan untuk bertindak atas pilihan hidup—sekalipun pilihannya ini dianggap bertentangan dengan yang lain atau *the power to*; 2) Agensi dengan kekuatan negatif mengacu pada kapasitas aktor-aktor yang memilih untuk mengesampingkan hak-hak orang lain melalui otoritas atau kewenangannya. Jika hal tersebut dikorelasikan dengan fakta yang terjadi di Arab Saudi sebelum adanya reformasi, kemampuan perempuan untuk bertindak dalam upaya pengambilan keputusan secara mandiri seringkali terbatas karena mengharuskan izin wali ketika melakukan suatu hal.

*Kedua*, Kabeer mengklasifikasikan tiga jenis *resource* atau sumber daya yaitu; 1) sumber daya ekonomi yang digunakan untuk perluasan kemampuan perempuan dalam menentukan suatu pilihan hidupnya; 2) sumber daya manusia yang dalam ini berupa pengalaman, skill, kreativitas, imajinasi, dan kemampuan lain-lainnya oleh seorang perempuan; 3) sumber daya sosial yang merupakan kemampuan perempuan dalam

menyuarakan adanya ketimpangan atau ketidaksetaraan agar dapat mengembangkan kesempatan hidupnya. Dengan terpenuhinya ketiga jenis sumber daya ini, maka kaum perempuan sejatinya dapat memiliki kapabilitas berupa potensi untuk hidup sebagaimana yang diinginkan. Meskipun demikian, fakta yang terjadi di Arab Saudi membuktikan bahwa sumber daya bagi perempuan seperti halnya akses pendidikan, pelatihan kerja, pun sumber daya ekonomi seringkali lebih terbatas. Hal ini sejatinya dapat menghambat kemampuan kaum perempuan Arab Saudi untuk mencapai potensi secara penuh.

*Ketiga*, Kabeer mendefinisikan *achievement* sebagai potensi dari diri individu—baik yang disadari ataupun belum disadari oleh individu tersebut saat melakukan suatu usaha. Dalam konteks pemberdayaan, Kabeer menyebutkan bahwa *achievement* ini seringkali dikaitkan dengan adanya kontrol diri. Adapun bentuk kontrol ini didefinisikan oleh Kabeer sebagai kemampuan kaum perempuan dalam mengakses suatu informasi, mengambil keputusan, dan bertindak sesuai dengan kepentingannya. Meskipun terdapat beberapa keterbatasan dalam akses dan kemampuan untuk bertindak, namun beberapa perempuan di Arab Saudi memiliki pencapaian yang cukup diperhitungkan di berbagai bidang seperti pada bidang pendidikan, bidang politik, dan bidang bisnis.

*Keempat*, Kabeer mendefinisikan *opportunity structure* sebagai tatanan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang dalam ini membentuk struktur peluang bagi kaum perempuan di Arab Saudi.

Terdapat beberapa aspek yang disoroti oleh Kabeer; 1) pada tatanan hukum dan kebijakan, kebijakan dan hukum di Arab Saudi dalam ini memainkan peran penting dalam membentuk struktur bagi perempuan; 2) pada bidang pendidikan, struktur peluang dalam bidang pendidikan mencakup akses perempuan ke pendidikan formal dan non-formal; 3) pada bidang ekonomi, struktur peluang ini turut mencakup akses lapangan kerja bagi para perempuan pada sektor formal dan informal; 4) pada bidang politik, struktur peluang pada bidang politik di Arab Saudi dapat dikatakan masih terdapat banyak kendala bagi para perempuan.<sup>113</sup>

Untuk lebih jelasnya, peneliti akan memaparkan kerangka pemberdayaan perempuan Naila Kabeer melalui lensa *agency*, *resource*, *achievement*, dan *opportunity structure* yang dikorelasikan dengan SDGs Nomor 5:

Tabel 7. Indikator Pemberdayaan Perempuan Oleh Naila Kabeer

No.	Indikator Pemberdayaan	Sebelum	Setelah	Perubahan Sosial
1.	<i>Agency</i> (Agensi)	Sebelum pemberdayaan perempuan digencarkan di Arab Saudi, banyak perempuan di Arab Saudi mengalami keterbatasan dalam bertindak karena harus memerlukan perizinan dari wali dalam melakukan suatu kegiatan.	1. Banyak perempuan memilih untuk bekerja 2. Banyak perempuan memilih untuk bepergian keluar rumah sendiri 3. Banyak perempuan meningkatkan kapasitas diri melalui program	Terdapat tren perubahan sosial yang diakibatkan oleh aktivitas pemberdayaan di Arab Saudi yang ditinjau dari adanya tren peningkatan kemampuan dalam bertindak oleh kaum perempuan untuk mendapatkan

<sup>113</sup> Kabeer, "Resources, Agency, Achievements."

			program peatihan yang dicanangkan kerajaan	akses ke sektor pendidikan dan ekonomi.
2.	<i>Resource</i> (Sumber Daya)	Sebelum Pemberdayaan perempuan di Arab Saudi digencarkan, akses perempuan ke sumber daya seperti jenjang pendidikan tinggi, pelatihan kerja, dan akses-akses lain cenderung menghambat kemampuan kaum perempuan untuk memaksimalkan potensi mereka.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setelah pemberdayaan perempuan digencarkan di Arab Saudi, kini Kerajaan Arab Saudi mulai menekankan dan mengakui pentingnya pemberdayaan perempuan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan Arab Saudi terhadap sektor minyak bumi.</li> <li>2. Penyediaan program peningkatan kapasitas bagi para perempuan seperti pelatihan Dorooob, Future Iniciative Skills, Pelatihan Parallel, beasiswa Studi luar negeri, dsb.</li> <li>3. Penyediaan bantuan subsidi bagi para pekerja perempuan seperti program Wusool, Qurrah, dsb.</li> </ol>	Upaya pemberdayaan perempuan di Arab Saudi dapat difokuskan pada peningkatan akses para perempuan dalam bidang pendidikan, politik, dan bisnis.
3.	<i>Achievement</i> (Prestasi)	Sebelum pemberdayaan perempuan di Arab Saudi digencarkan, memanglah terdapat beberapa	1. Setelah gencarnya pemberdayaan perempuan di Arab Saudi, terdapat dorongan yang lebih besar	Terdapat tren atau dorongan dari untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di

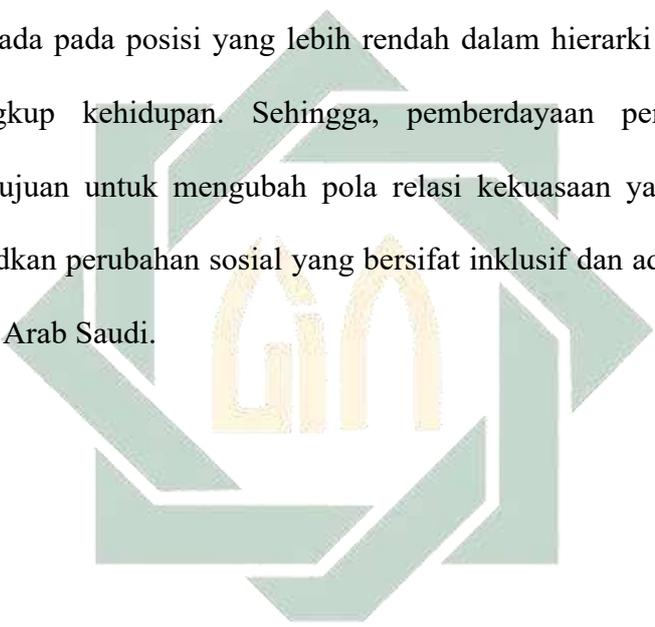
		<p>pencapaian individu oleh perempuan di Arab Saudi. Meskipun demikian, seringkali perempuan-perempuan Arab Saudi ini dihadapkan dengan berbagai hambatan dalam upaya penggalan potensi di beberapa bidang.</p>	<p>kepada kaum perempuan untuk menggali setiap potensi dalam dirinya.</p> <p>2. Saat ini perempuan Arab Saudi telah banyak yang menduduki posisi kepemimpinan, baik di institusi dalam negeri maupun internasional</p> <p>3. Telah banyak perempuan yang menerima beasiswa untuk melakukan studi di luar negeri</p>	<p>Arab Saudi untuk menciptakan lebih banyak peluang bagi perempuan untuk mencapai pencapaian yang lebih tinggi di berbagai aspek kehidupan.</p>
4.	<p><i>Opportunity Structure</i> (Struktur Peluang)</p>	<p>1. Perempuan di Arab Saudi banyak mengalami hambatan dalam mendapatkan akses pendidikan;</p> <p>2. Terjadi pembatasan ekonomi dalam mengakses lapangan kerja karena banyak sektor yang tidak terbuka untuk kaum perempuan. Disisi lain, aturan perwalian juga menghambat mobilitas kaum</p>	<p>1. Adanya reformasi sosial sejalan dengan SDGs nomor 5 demi menjamin kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.</p> <p>reformasi dapat terlihat melalui penyediaan sistem pendidikan yang mana memberikan banyak peluang kepada para perempuan untuk melakukan studi dan pengembangan keterampilan;</p> <p>2. Ketersediaan UU yang berfungsi</p>	<p>Terdapat suatu dorongan yang besar untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di Arab Saudi dengan memperluas kesempatan atau peluang dalam mengentas segala hambatan-hambatan tradisional yang seringkali dialami oleh kaum perempuan di Arab Saudi.</p>

	<p>perempuan untuk mengakses pekerjaan;</p> <p>3. Terdapat pembatasan akses dalam kehidupan publik seperti adanya pemberlakuan aturan larangan mengemudi, aturan tentang cara berpakaian, dan aturan tentang interaksi dengan lawan jenis.</p>	<p>untuk memberikan proteksi kepada para perempuan saudi yang bekerja;</p> <p>3. Penerbitan Dekrit Kerajaan untuk mengizinkan perempuan menyetir mobil sendiri, untuk memudahkan mereka beraktivitas di luar rumah</p> <p>4. Amandemen UU Anti Pelecehan bagi perempuan yang terbukti lebih melindungi para perempuan</p> <p>5. Menyediakan 20% alokasi kursi parlemen untuk para perempuan</p>	
--	--	---	--

Sumber: diolah oleh peneliti

Mengacu pada tabel tersebut diatas, dapat ditarik benang merah bahwa *agency* dan *opportunity structure* merupakan aspek kunci dalam konteks pemberdayaan di Arab Saudi—yang mana fokusnya adalah pada peningkatan kemampuan perempuan dalam *decision making process* yang pada akhirnya berdampak pada kehidupan mereka; 1) dimensi *agency* dan *opportunity structure* merupakan proses dimana perempuan mengambil keputusan yang dilakukan secara sadar—dengan menimbang peluang-peluang yang tersedia; 2) dimensi *resource* merupakan proses yang mendasari kaum perempuan dalam mengambil keputusan; 3) dimensi

*achievement* merupakan hasil pencapaian dari buah atau aktualisasi dari keputusan yang ditempuh. Menurut hemat penulis, pemberdayaan dalam ini sangatlah penting bagi kaum perempuan—khususnya untuk kaum perempuan di Arab Saudi dalam menyongsong adanya perubahan dalam struktur kekuasaan yang telah dianut oleh suatu negara. Selama ini, perempuan seringkali berada pada posisi yang lebih rendah dalam hierarki sosial dalam berbagai lingkup kehidupan. Sehingga, pemberdayaan perempuan ini sejatinya bertujuan untuk mengubah pola relasi kekuasaan yang telah ada guna mewujudkan perubahan sosial yang bersifat inklusif dan adil bagi kaum perempuan di Arab Saudi.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kerajaan telah melaksanakan berbagai komitmen yang cukup baik dalam implementasi SDGs no.5 sebagai sebuah norma yang telah disepakati secara internasional menjadi substansi primer dalam pembangunan manusia khususnya pada kaum perempuan demi tercapainya kesetaraan gender di seluruh dunia. Adapun komitmen tersebut tersebut dapat dilihat melalui implementasi target 5.1 dan 5.c dalam bentuk ketersediaan payung hukum melalui dekrit kerajaan no. m/52. Kemudian pada target 5.2, Kerajaan berhasil melakukan amandemen UU Anti pelecehan yang terbukti memberikan proteksi lebih kepada kaum perempuan. Pada target 5.3, peneliti menemukan bahwa Kerajaan Arab Saudi belum sepenuhnya melakukan usaha nyata dalam pemenuhan target ini, terlihat dari penurunan yang tergolong sedikit dalam kasus pernikahan pada perempuan usia dini (15-19 tahun). Pada target 5.4, peneliti menemukan bahwa Kerajaan telah melakukan komitmen yang sangat progresif melalui penerbitan lebih dari 147 ribu Surat Izin Mengemudi bagi para perempuan per 2020, sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan dengan lebih mudah. Pada target 5.5, Kerajaan telah berhasil menunjukkan komitmennya melalui peluncuran Qiyadyat atau program pelatihan kepemimpinan bagi para perempuan, kemudian Kerajaan juga berhasil

menyediakan 20% alokasi kursi pada dewan syura atau Majelis Permusyawaratan Arab Saudi kepada para perempuan, kemudian sekitar 6.8% perempuan Arab Saudi telah berhasil menduduki posisi kepemimpinan atau manajerial dalam berbagai sektor baik di kancah nasional Arab Saudi maupun dalam tingkat Internasional. Pada target 5.6, kerajaan telah menyediakan payung hukum yang tertuang dalam Pasal 27 Dekrit Kerajaan no. A/90 yang menegaskan bahwa akses kesehatan ialah hak dasar dan melekat pada setiap individu. Kerajaan juga berhasil mendorong ibu hamil untuk melakukan tes rutin kesehatan selama kehamilannya, terbukti dengan sekitar 99.7% ibu hamil mengunjungi fasilitas kesehatan setidaknya sekali dalam proses kehamilannya. Pada pemenuhan target 5.a, kerajaan telah berhasil memberikan pinjaman hipotek kepada lebih dari 73 ribu perempuan Arab Saudi untuk memiliki rumah sendiri, namun dalam sektor kepemilikan lahan pertanian yang produktif, tingkat kepemilikan dari kaum perempuan hanya sedikit yakni 0.31%, berbanding jauh dengan kaum laki- laki yang mencapai 20.81% per 2018. Pada target 5.b, peneliti menemukan kemajuan yang cukup progresif pada presentase kepemilikan ponsel pintar oleh perempuan Arab Saudi, dalam kurun waktu 2019 hingga 2021, ditemukan kenaikan sebanyak 8.74% menjadi 93.98%. Berdasarkan indikator yang dikemukakan oleh Naila Kabeer, Kerajaan Arab Saudi telah menunjukkan pemberdayaan yang cukup baik terhadap perempuan.

## B. Saran

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam melakukan penulisan penelitian skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dari berbagai pihak terkait.

Peneliti menyadari bahwa Kerajaan Arab Saudi telah melakukan komitmen yang cukup baik dalam melakukan implementasi SDGs no.5 demi mencapai kesetaraan gender, namun peneliti masih menemukan kurangnya pemberdayaan perempuan terutama pada hal-hal krusial seperti pernikahan pada anak usia dini yang merenggut masa cemerlang perempuan Arab Saudi, oleh karena itu peneliti mengharapkan usaha yang lebih dari Kerajaan sebagai pemangku kebijakan untuk dapat mengentaskan masalah ini. Kemudian peneliti juga berharap agar Kerajaan Arab Saudi dapat melaksanakan laporan khusus terkait *progress* implementasi SDGs dengan rutin setiap tahunnya, agar khalayak dapat mengetahui sejauh mana perubahan yang telah dilakukan oleh Kerajaan dalam implementasi SDGs khususnya nomor 5.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agarwal, Bina. "Gender Equality, Food Security and the Sustainable Development Goals." *Current Opinion in Environmental Sustainability* 34 (October 2018): 26–32. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2018.07.002>.
- Agora. "Sustainable Development Goals (SDGs) Post 2015 Agenda." Accessed May 16, 2024. <https://www.agora-parl.org/resources/aoe/sustainable-development-goals-sdgs-post-2015-agenda>.
- Agus Sutopo, Dian Fitriana Arthati, and Utari Azalika Rahmi. *Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)*. Badan Pusat Statistik, 2014. <https://webapi.bps.go.id/download.php?f=yt3PIY+/inNVuqAW1DDD1VYVyxFRHHkyhhl6V6NvembEaNiTDyZB+302g1dx1/v0Z9SUio8yl6s3f64DYpAjATMDqrJ7uaBG5KMuJ+cDsRHvbYt+sCx599DrwIlOlnCy+Mmj1ki1bYG5IvOfglwKBAOnvhaRgLkvYleUSnV/MVfidZUuP/GwqpInh4AJIGFX1zPC9t/i0/Or7hqVR9WHDRIvZaoRc7MmMX1LAjq3oMfpftuxfOf03NjLIgPij7aoD6iJ+nxLEgPgKTUt2lZPiXchxrHWD0vPX26jjQ6vE=>.
- Ahmad Fauzi Iyabu. "Print History, Saudi Arabia Approves The First Forces Of The Women's Army." Accessed March 24, 2024. <https://voi.id/en/news/81596>.
- Alia Chughtai. "Line of Succession to Saudi Arabia's Throne," June 21, 2017. <https://www.aljazeera.com/news/2017/6/21/line-of-succession-to-saudi-arabias-throne>.
- Andrew Bartlett. "Entry Points For Empowerment :A Report For CARE Bangladesh," June 2004. [https://www.carebangladesh.org/upload/files/Publication\\_87893.pdf](https://www.carebangladesh.org/upload/files/Publication_87893.pdf).
- Anouar Boukhars. "Crisis of Legitimacy In Saudi Arabia," January 2005.
- "Anti- Harassment Law." Bureau of Experts at The Council of Ministers. Accessed March 19, 2024. <https://laws.boe.gov.sa/Files/Download/?attId=20d22961-edd8-48e4-8ad3-adbb010dcadb>.
- Arab Digital Inclusion Platform. "Saudi Arabia Law on Protection from Abuse,"

2013. <https://e-inclusion.unescwa.org/index.php/resources/1064>.
- Arab News. "8,016 Cases of Abuse Recorded in One Year," December 16, 2015. <https://www.arabnews.com/saudi-arabia/news/851131>.
- . "Saudi Fund Helps More than 73,000 Women to Own Homes," December 7, 2020. <https://www.arabnews.com/node/1773461/saudi-arabia>.
- . "Saudi Ministry of Justice: 315% Increase in Licenses Granted to Lawyers," September 14, 2023. <https://www.arabnews.com/node/2373251/saudi-arabia>.
- . "What Saudi Arabia Is Doing to End Violence against Women," November 25, 2018. <https://www.arabnews.com/node/1410516/saudi-arabia>.
- Asharq Al Awsat. "Haifa Al-Muqrin Becomes KSA's Permanent Representative to UNESCO." Accessed March 2, 2024. <https://english.aawsat.com/home/article/2084236/haifa-al-muqrin-becomes-ksa%E2%80%99s-permanent-representative-unesco>.
- BBC. "Saudi Court Orders First Naming of Man Guilty of Sexual Harassment," January 12, 2022. <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-59956826>.
- Budi Rachman, Junita, Yanyan Mochamad Yani, and Sayitri Aditiany. "Human Security In The Sustainable Development Goal 5 (SDGs 5) And Its Implementation In Indonesia." In *Proceedings of the 2nd International Conference on Social and Political Development (ICOSOP 2017)*. Medan, Indonesia: Atlantis Press, 2018. <https://doi.org/10.2991/icosop-17.2018.1>.
- Chambers, Robert. *Challenging the Professions: Frontiers for Rural Development*. Reprint. London: Intermediate Technology Publ, 2002.
- Deema Al-Khudair. "'An Honor and Duty:' Meet the Female Saudi Officers Guarding the Prophet's Mosque in Madinah," April 28, 2021. <https://www.arabnews.com/node/1850621/saudi-arabia>.
- Department of Economic and Social Affairs. "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development." Accessed November 14, 2023.

<https://sdgs.un.org/2030agenda>.

Dwiastuti, Ilmi, Anggara Raharyo, Muhammad Farid, and Riski Baskoro. "KOMITMEN INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI SDGs NOMOR 5 UNTUK MENJAMIN KEAMANAN MANUSIA KHUSUSNYA PEREMPUAN (2015-2021)," n.d.

Ernst, Kelly Patrícia, Rhaíssa Pagot, and Jussara Reis Prá. "Sustainable Development Goal 5: Women's Political Participation in South America." *World Development Sustainability* 4 (June 2024): 100138. <https://doi.org/10.1016/j.wds.2024.100138>.

Finnemore, Martha, and Kathryn Sikkink. "International Norm Dynamics and Political Change." *International Organization* 52, no. 4 (1998): 887–917. <https://doi.org/10.1162/002081898550789>.

Florini, Ann. "The Evolution of International Norms." *International Studies Quarterly* 40, no. 3 (September 1996): 363. <https://doi.org/10.2307/2600716>.

Forbes. "Sarah Al-Suhaimi - Most Powerful Businesswomen 2024 - Forbes Lists." Accessed March 2, 2024. <https://www.forbesmiddleeast.com/lists/100-most-powerful-businesswomen-2024/sarah-al-suhaimi/>.

———. "The World's 100 Most Powerful Women List." Accessed March 2, 2024. <https://www.forbes.com/power-women/list/>.

"Future We Want- Outcome Document." Rio de Janeiro, 2012.

General Authority for Statistics. "Bulletin of Households and Individuals' ICT Access and Usage Survey," 2019. [https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/bulletin\\_of\\_households\\_and\\_individuals\\_ict\\_access\\_and\\_usage\\_survey2019\\_new.pdf](https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/bulletin_of_households_and_individuals_ict_access_and_usage_survey2019_new.pdf).

———. "Census 2010." Accessed February 15, 2024. [https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/en-census2010-dtl-result\\_2\\_1.pdf](https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/en-census2010-dtl-result_2_1.pdf).

———. "Labor Force Survey 2015 2nd Half," 2015. <https://www.stats.gov.sa/en/4118>.

- . “Labour Market, Fourth Quarter 2018,” 2018.  
[https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/lm\\_2018\\_q4%20v2\\_0.xlsx](https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/lm_2018_q4%20v2_0.xlsx).
- . “Registered- Based Labour Market Statistics- Q4, 2023,” 2023.  
<https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/Register-based%20Labour%20Market%20Statistics-%20Q4%202023%20En.xlsx>.
- . “Saudi Women The Partner of Success: International Women’s Day.” Accessed March 2, 2024.  
[https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/woman\\_international\\_day\\_2020EN.pdf](https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/woman_international_day_2020EN.pdf).
- . “Saudi Women’s Report 2022.” Accessed December 15, 2024.  
[https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/Saudi\\_Women%27s\\_Report\\_2022\\_EN.pdf](https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/Saudi_Women%27s_Report_2022_EN.pdf).
- . “Survey of Access & Usage Households & Individuals to ICT 2021,” 2021. <https://www.stats.gov.sa/en/952>.
- . “Sustainable Development Goals( SDGs) in KSA: Status Quo Statistical Report,” 2018.  
[https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/sustainable\\_development\\_goals\\_sdgs\\_in\\_ksa\\_-en.pdf](https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/sustainable_development_goals_sdgs_in_ksa_-en.pdf).
- . “Women Health and Reproductive Care Statistics Publication 2023,” 2023.  
[https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/Women\\_Health\\_and\\_Reproductive\\_Care\\_Statistics\\_Publication\\_2023\\_EN.pdf](https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/Women_Health_and_Reproductive_Care_Statistics_Publication_2023_EN.pdf).
- Goggin, Malcolm L., ed. *Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation*. Glenview, Ill: Scott, Foresman/Little, Brown Higher Education, 1990.
- Hardiyanti, Mega, and Sri Yuniati. “PENJAMINAN HAK-HAK PEREMPUAN DALAM VISI SAUDI ARABIA 2030.” *Journal of Feminism and Gender Studies* 1, no. 1 (January 27, 2021): 1.  
<https://doi.org/10.19184/fgs.v1i1.21552>.
- Harry St. John Bridger Philby, Joshua Teitelbaum, and William L. Ochenswald. “Saudi Arabia,” March 4, 2024. <https://www.britannica.com/place/Saudi->

Arabia.

Human Resources Development Fund. "Program for Supporting Hospitality for Children (Qurrah): Guide for Parents," 2023.

[https://rum.hrdf.org.sa/media/bleki5ag/222%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A9\\_compressed-1.docx](https://rum.hrdf.org.sa/media/bleki5ag/222%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A9_compressed-1.docx).

Human Rights Watch. "Saudi Arabia: 10 Reasons Why Women Flee." Accessed November 13, 2023. <https://www.hrw.org/news/2019/01/30/saudi-arabia-10-reasons-why-women-flee>.

Hvidt, Martin. "The New Role of Women in the New Saudi Arabian Economy." *Videnscenter Om Det Moderne Mellemøsten*, 2018.

Ibrahim, Solava, and Sabina Alkire. "Agency and Empowerment: A Proposal for Internationally Comparable Indicators." *Oxford Development Studies* 35, no. 4 (December 2007): 379–403. <https://doi.org/10.1080/13600810701701897>.

Ismail, Maimunah, Roziah Mohd Rasdi, and Akhmal Nadirah Abd. Jamal. "Gender Empowerment Measure in Political Achievement in Selected Developed and Developing Countries." *Gender in Management: An International Journal* 26, no. 5 (July 19, 2011): 380–92. <https://doi.org/10.1108/175424111111154912>.

John W. Creswell and J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Fifth Edition. SAGE Publications, Inc., 2018.

Kabeer, Naila. "Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment." *Development and Change* 30, no. 3 (July 1999): 435–64. <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). "Implementasi." Accessed April 17, 2024. <https://kbbi.web.id/implementasi>.

———. "Komitmen," n.d. <https://kbbi.web.id/komitmen>.

Kim, Eun Mee. "Gender and the Sustainable Development Goals." *Global Social*

- Policy* 17, no. 2 (August 2017): 239–44.  
<https://doi.org/10.1177/1468018117703444>.
- Kingdom of Saudi Arabia. “Vision 2030,” 2016.  
[https://www.vision2030.gov.sa/media/rc0b5oy1/saudi\\_vision203.pdf](https://www.vision2030.gov.sa/media/rc0b5oy1/saudi_vision203.pdf).
- “Labor Law (Royal Decree No. M/51).” Accessed February 15, 2024.  
<https://laboreducation.mlsd.gov.sa/sites/default/files/2022-01/Labor.pdf>.
- “Labor Market Fourth Quarter 2016.” General Authority For Statistics, 2016.  
<https://www.stats.gov.sa/en/5288>.
- Leopold, Till Alexander, Vesselina Ratcheva, and Saadia Zahidi. *The Global Gender Gap Report 2016*. Geneva, Switzerland: World Economic Forum, 2016.
- Maha Akeel. “Female Circumcision: Weight Of Tradition Perpetuates A Dangerous Practice.” Accessed May 12, 2024.  
[https://www.arabnews.com/node/263988?\\_\\_cf\\_chl\\_tk=NaNLZbjk\\_dNBgk9VQ5n7fpmF.CnFKI8tc.CxOU3fnOw-1717942894-0.0.1.1-4756](https://www.arabnews.com/node/263988?__cf_chl_tk=NaNLZbjk_dNBgk9VQ5n7fpmF.CnFKI8tc.CxOU3fnOw-1717942894-0.0.1.1-4756).
- Malhotra, Anju, Sidney Ruth Schuler, and Carol Boender. “Measuring Women’s Empowerment as a Variable in International Development. In Background Paper Prepared for the World Bank Workshop on Poverty and Gender: New Perspectives.” *The World Bank* 28 (June 28, 2002).
- Markel, Erin. “Measuring Women’s Economic Empowerment in Private Sector Development: Guidelines for Practitioners.” *DCED*, July 2014.
- Matthew B. Miles and Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode- Metode Baru*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Mazmanian, Daniel A., and Paul A. Sabatier. *Implementation and Public Policy*. The Scott, Foresman Public Policy Analysis and Management Series. Glenview, Ill: Scott, Foresman, 1983.
- Meleong, Lexy J. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989.
- Middle East Policy Council. “Saudi Women Gain Representation on the Shura Council.” Accessed March 2, 2024. <https://mepc.org/commentary/saudi-women-gain-representation-shura-council>.

- Ministry of Communications and Information Technology. “Women’s Empowerment.” Accessed March 21, 2024. <https://www.mcit.gov.sa/en/womens-empowerment>.
- Ministry of Finance. “Women’s Empowerment Initiative Within the Saudi Annual Budget.” Accessed March 20, 2024. <https://www.mof.gov.sa/en/budget/2023/Documents/Women%20Empowerment.pdf>.
- Ministry of Health. “Child and Woman Health Clinics,” July 29, 2019. <https://www.moh.gov.sa/en/Ministry/Projects/Women-and-Child-Health-Clinics/Pages/default.aspx>.
- Ministry of Human Resources and Social Development. “MHRSD Signs (25) Training Agreements and Training Partnerships at the Global Labor Market Conference,” December 31, 2023. <https://www.hrsd.gov.sa/en/media-center/news/141220233>.
- Ministry of Justice. “Sustainable Development Goals.” Accessed March 24, 2024. <https://www.moj.gov.sa/English/Ministry/SustainableDevelopment/Pages/SustainableDevelopmentGoals.aspx>.
- Mohtar Mas’oed. *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis Dan Teorisasi*. Yogyakarta PAU-SS-UGM, 1989.
- Mosedale, Sarah. “Assessing Women’s Empowerment: Towards a Conceptual Framework.” *Journal of International Development* 17, no. 2 (March 2005): 243–57. <https://doi.org/10.1002/jid.1212>.
- Okaz. “5 Years in Jail for Syrian Doctor Who Sexually Harassed Filipino Nurse,” October 1, 2023. <https://www.saudigazette.com.sa/article/636368/SAUDI-ARABIA/5-year-jail-for-Syrian-doctor-for-sexually-harassing-Filipino-nurse-in-Asir>.
- Purwanto, Erwan Agus, and Dyah Ratih Sulistyastuti. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Gave Media, 2012.
- Qur’an NU. “Surat At-Taubah Ayat 71: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap.” Accessed May 28, 2024. <https://quran.nu.or.id/at-taubah/71>.

- Ria Susanti, Rabi'ah, Hajriana, and Ihda Ihromi. "Agency Perempuan Pada Pondok Pesantren Di Kalimantan Selatan." *Al-Banjari* Vol.20, No.1, Januari-Juni (2021).  
[https://www.researchgate.net/publication/366556938\\_AGENCY\\_PEREMPUAN\\_PADA\\_PONDOK\\_PESANTREN\\_DI\\_KALIMANTAN\\_SELATAN](https://www.researchgate.net/publication/366556938_AGENCY_PEREMPUAN_PADA_PONDOK_PESANTREN_DI_KALIMANTAN_SELATAN).
- Ricky W. Griffin. *Manajemen*. 7. Erlangga, 2004.
- Rijali, Ahmad. "ANALISIS DATA KUALITATIF." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (January 2, 2019): 81.  
<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Riyadh Bureau. "Saudi Arabia Amends Anti- Harassment Law," January 15, 2021. <https://www.riyadhbureau.com/p/name-and-shame>.
- Rosida, Anis. "WACANA MODERNISASI DALAM TANTANGAN PERADABAN, PERAN PEREMPUAN SEBAGAI TONGGAK SEJARAH ARAB SAUDI." *Palita: Journal of Social-Religion Research* 3, no. 1 (August 27, 2018): 81–96. <https://doi.org/10.24256/pal.v3i1.195>.
- Ruth Halperin-Kaddari and Marsha Freeman. "Economic Consequences of Marriage and Its Dissolution: Applying a Universal Equality Norm in a Fragmented Universe," 2017.  
[https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2992606](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2992606).
- Samman, Emma, and Maria Emma Santos. "Agency and Empowerment: A Review of Concepts, Indicators and Empirical Evidence." *Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI)*, 2009. <https://ophi.org.uk/ophi-research-paper-10a/>.
- Sana Naseem and Kamini Dhruva. "Issues and Challenges of Saudi Female Labor Force and the Role of Vision 2030: A Working Paper." *International Journal of Economics and Financial Issues* Vol.7, no. 4 (December 1, 2017): 23–27.
- Saudi Arabia's National Unified Portal for Government Services and Information. "Working Women Transportation (Wusool)." Women Empowerment, n.d.  
<https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/careaboutyou/womenempowering>.

- Saudi Gazette. "100 New Women Notaries to Join Duty on Nov. 1." Accessed March 24, 2024. <https://saudigazette.com.sa/article/599553>.
- . "MCIT Launches Second Edition of Technology Pioneers Program," March 15, 2021. <https://saudigazette.com.sa/article/604418>.
- . "Saudi Women Start to Take over Jobs at Justice Ministry," December 9, 2018. <https://saudigazette.com.sa/article/549842>.
- Saudi Press Agency. "Hadaf: 168,000 Beneficiaries of Transportation Support Program (Wusool)," October 9, 2022. <https://www.spa.gov.sa/2390912>.
- "Saudi Women: The Partner of Success (International Women's Day)." General Authority for Statistics, 2020. [https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/woman\\_international\\_day\\_2020.pdf](https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/woman_international_day_2020.pdf).
- Saudi-US Trade Group. "Saudi Arabia Names New Ambassador to United States: Princess Reema Bint Bandar." Accessed March 2, 2024. <https://www.sustg.com/saudi-arabia-names-new-ambassador-to-united-states-princess-reema-bint-bandar/>.
- Syaibani, R. "Studi Kepustakaan." *Universitas Sumatera Utara*, 2012.
- Tax Free World Association. "Basmah Al-Mayman - The MEADFA Conference." Accessed March 2, 2024. <https://www.tfwa.com/the-meadfa-conference/basmah-al-mayman-100011992>.
- The 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals an Opportunity for Latin America and the Caribbean*. Santiago: United Nations, ECLAC, 2018.
- The Embassy of The Kingdom of Saudi Arabia. "Basic Law of Governance." Accessed March 2, 2024. <https://www.saudiembassy.net/basic-law-governance>.
- . "King Salman Issues Royal Decree: Women Will Drive in Saudi Arabia," September 26, 2017. <https://www.saudiembassy.net/press-release/king-salman-issues-royal-decree-women-will-drive-saudi-arabia>.
- The National. "Saudi Arabia Moves to Ban Child Marriage with a New Ruling," 2019. <https://www.thenationalnews.com/world/gcc/saudi-arabia-moves-to>

ban-child-marriage-with-a-new-ruling-1.955310.

The Shura Council. "Member CV'S." Accessed March 2, 2024.

<https://www.shura.gov.sa/wps/wcm/connect/shuraen/internet/cv>.

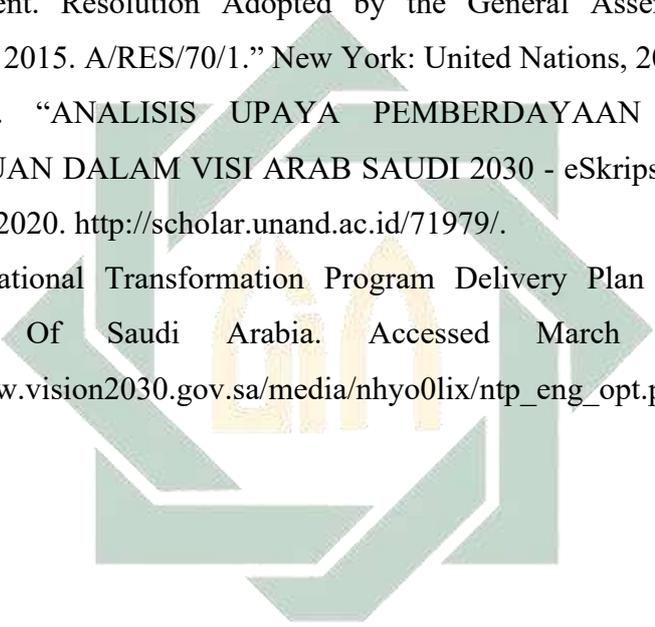
UN Women. "Women Count: Saudi Arabia." Accessed March 2, 2024.

<https://data.unwomen.org/country/saudi-arabia>.

United Nations. "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution Adopted by the General Assembly on 25 September 2015. A/RES/70/1." New York: United Nations, 2015.

Vira, Vierentina. "ANALISIS UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN DALAM VISI ARAB SAUDI 2030 - eSkripsi Universitas Andalas," 2020. <http://scholar.unand.ac.id/71979/>.

Vision 2030. "National Transformation Program Delivery Plan 2021-2025." Kingdom Of Saudi Arabia. Accessed March 21, 2024. [https://www.vision2030.gov.sa/media/nhyo0lix/ntp\\_eng\\_opt.pdf](https://www.vision2030.gov.sa/media/nhyo0lix/ntp_eng_opt.pdf).



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A